

**RENCANA STRATEGIS
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERIODE 2017-2022**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah Yang Maha Kuasa pada akhirnya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dapat diselesaikan. Buku Renstra tahun 2017 – 2022 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai implementasi dari Tugas Pokok dan Fungsi yang kami emban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Aceh nomor 125 tahun 2016.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA), maka peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan masih dijadikan sebagai salah satu sasaran utama dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan. Sasaran ini ditetapkan mengingat Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah yang berkontribusi dalam peningkatan produksi ikan nasional. Selanjutnya dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh ditetapkan beberapa indikator utama lainnya yaitu pada peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, konsumsi ikan, komoditi ekspor dan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan.

Semoga Buku Renstra ini dapat dipergunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Aceh Tahun 2017 – 2022, baik yang dilakukan oleh SKPA, para pelaku usaha maupun sektor terkait lainnya dengan pembangunan kelautan dan perikanan.

Banda Aceh, Desember 2017
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh



Ir. T. Diauddin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	V
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH.....	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	5
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	25
2.3.1. Produksi Perikanan	27
2.3.2. Konsumsi Ikan	28
2.3.3. Kontribusi Subsektor Perikanan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	29
2.3.4. Cakupan Bina Kelompok Nelayan	30
2.3.5. Capaian Produksi Perikanan Nelayan	31
2.3.6. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	33
2.4 Kinerja Anggaran.....	34
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah	38
2.5.1. Tantangan.....	38
2.5.2. Peluang.....	39
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	40
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	40
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	44
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	48

3.3.1. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	48
3.3.2. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).....	49
3.3.3. Tujuan.....	50
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	50
3.4.1. Rencana Kawasan Konservasi	52
3.4.2. Rencana Pemanfaatan Kawasan Pemanfaatan Umum.....	53
3.4.3. Rencana Kawasan Pemanfaatan Alur Laut	57
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	58
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	61
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.....	61
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	66
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.....	69
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	92
BAB VIII. PENUTUP	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rincian Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Berdasarkan Jabatan	22
Tabel 2.2 Rincian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan	22
Tabel 2.3 Rincian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan	23
Tabel 2.4 Sarana Pelayanan Umum DKP Aceh.....	23
Tabel 2.5 Sarana Mobilitas dan Perangkat Pendukung Lainnya	24
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.....	26
Tabel 2.7 Volume produksi perikanan Aceh tahun 2012-2016 (ton)	27
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh.....	37
Tabel 3.1 Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah	41
Tabel 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis.....	59
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DKP Aceh.....	61
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	66
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2017-2022.	71
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMA.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Produksi Perikanan (Ton) tahun 2012 - 2016	28
Gambar 2.2	Rasio Realisasi Capaian dan Target Tingkat Konsumsi Ikan Perkapita Aceh	29
Gambar 2.3	Perkembangan Kontribusi Sub Sektor Perikanan Aceh 2012-2016	30
Gambar 2.4	Perkembangan cakupan bina kelompok nelayan tahun 2012 – 2016....	31
Gambar 2.5	Nilai Produksi Perikanan Kelompok Nelayan.....	32
Gambar 2.6	Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN).....	33

1.1 Latar Belakang

Secara geografis Aceh dikelilingi oleh lautan yaitu Samudera Hindia di wilayah barat-selatan Aceh, serta Selat Malaka dan Perairan Andaman di wilayah utara-timur Aceh. Daratan Aceh memiliki luas kurang lebih 57 ribu km² dan Panjang pantai Aceh mencapai 2 ribu km². Luas perairan laut Aceh mencapai 295 ribu km² terdiri dari perairan teritorial dan perairan kepulauan, serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Sektor perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan menjadi sektor-sektor utama dalam pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan Aceh. Total produksi perikanan pada tahun 2016 sekitar 265 ribu ton diharapkan mendukung peningkatan konsumsi ikan dan meningkatkan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan. Total produksi tersebut diperoleh dari hasil tangkapan di laut dan perairan lainnya sekitar 181 ribu ton dan 84 ribu ton dari perikanan budidaya. Pengawasan dan upaya perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan terus diupayakan untuk menjaga keberlanjutan usaha pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh yang lebih baik, upaya pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dilaksanakan secara terencana yang dilandasi dengan kebijakan serta berkelanjutan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh adalah unsur Perangkat Daerah, sebagai pelaksana kewenangan daerah dalam bidang Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah Gubernur Aceh dan bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh. Susunan kelembagaan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh adalah Dokumen perencanaan SKPA untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2017 - 2022 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan selama kurun waktu tahun 5 (lima) tahun dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Berpedoman kepada Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Maka, dibuat rencana strategis ini sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
9. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
14. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;

16. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Presiden No 05 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
19. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, yang berisikan Pedoman dalam rangka memantapkan manajemen pemerintah dan pembangunan yang akuntabel dan terwujudnya GOOD GOVERNMENT;
23. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
24. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan
25. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh
26. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
27. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;

29. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Draft Teknokratik Tahun 2012-2017.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan rencana strategis dimaksudkan sebagai arah dan pedoman bagi seluruh aparatur pada jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pembangunan di bidang kelautan dan perikanan selama lima tahun ke depan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan pelayanan kepada masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan rencana strategis ini adalah agar aparatur pada jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh memiliki pandangan (persepsi) yang sama terhadap arah pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang selaras dan sejalan dengan visi, misi serta kebijakan pembangunan Aceh.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dituangkan menjadi dokumen menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kelembagaan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terbentuk berdasarkan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh dan Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh. Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat;
3. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
4. Bidang Perikanan Tangkap
5. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
6. Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (DKP Aceh) merupakan perangkat provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk membantu Gubernur Aceh dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan di Aceh. Dalam menjalankan tugas pokoknya, DKP Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas setingkat eselon IIa dan didukung oleh bidang struktural dan teknis yakni Sekretariat; Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Bidang perikanan tangkap, Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan serta Unit Pelayanan Teknis Daerah/ Dinas (UPTD).

Sekretariat terdiri Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat; Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terdiri dari Seksi Pengelolaan dan Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil; Seksi Pelayanan dan Pengembangan usaha Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Seksi Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan; Seksi Pengembangan Usaha dan Kenelayanan; dan Seksi Prasarana Perikanan Tangkap. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari: Seksi Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan; Seksi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya; dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Bidang Pengawasan

Kelautan dan Perikanan terdiri dari: Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau pulau Kecil; Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan; dan Seksi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mempunyai tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2016. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah Aceh dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Aceh. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mempunyai fungsi sebagaiberikut:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi terhadap perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 Gross Tonnage (GT);
- f. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
- h. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- j. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 (tiga puluh) GT;

- k. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap fasilitasi dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
- m. Pelaksanaan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- n. Pelaksanaan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- o. Pelaksanaan fasilitasi terhadap dukungan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 (tiga puluh) GT;
- p. Pembinaan UPTD; dan
- q. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kelautan dan perikanan.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh adalah:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Pelaksanaan perumusan kebijakan pengelolaan, dukungan teknis penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
- c. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;

- d. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- e. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian fasilitasi terhadap dukungan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 Gross Tonnage (GT);
- f. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 4 mil;
- h. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- i. Pelaksanaan fasilitasi teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 (tiga puluh) GT;
- j. Pelaksanaan fasilitasi teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan dukungan teknis penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- k. Pelaksanaan dan pengendalian terhadap evaluasi dan pelaporan pengelolaan, dukungan teknis penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 4 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- l. Pelaksanaan fasilitasi teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 (tiga puluh) GT;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Gubernur sesuai bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, hukum, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan. Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, pengelolaan arsip aktif, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan kearsipan serta hubungan masyarakat dan protokoler;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan;
- c. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan bidang hukum dan perundang-undangan, pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, dan urusan ketatausahaan;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Program, Informasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, penelitian, pengkajian, pengembangan data dan informasi, kehumasan, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan.
2. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan penatausahaan keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pengelolaan dan pemeliharaan aset, evaluasi dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan.
3. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan administrasi, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, kehumasan, keprotokolan, perpustakaan, kearsipan, barang inventaris, administrasi kepegawaian, organisasi, hukum, perundang-undangan, ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi lainnya.

3. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil merupakan unsur pelaksana teknis bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan, dukungan teknis penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi di atas 4 mil, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K), serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian terhadap pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir, izin pengelolaan produksi garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, izin wisata bahari, izin pemanfaatan air laut selain energi, izin lokasi dan izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggalam (BMKT);
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi, penerbitan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi, penataan batas kawasan konservasi, dan pengelolaan kawasan konservasi;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari :

1. Seksi Pengelolaan dan Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K), pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.

2. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Usaha Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir, izin pengelolaan produksi garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, izin wisata bahari, izin pemanfaatan air laut selain energi, izin lokasi dan izin pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggalam (BMKT), serta tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.
3. Seksi Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi, penerbitan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi, penataan batas kawasan konservasi, dan pengelolaan kawasan konservasi, serta tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.

4. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap merupakan unsur pelaksana teknis bidang perikanan tangkap. Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 4 mil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, dukungan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 30 (tiga puluh) GT. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 4 mil;

- b. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian terhadap pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Pemasangan Rumpon, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian terhadap pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari:

1. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 4 mil.
2. Seksi Pengembangan Usaha dan Kenelayanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Pemasangan Rumpon, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.
3. Seksi Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.

5. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan merupakan unsur pelaksana teknis di Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan, pemasaran, dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengelolaan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- c. Pelaksanaan pengelolaan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari:

1. Seksi Produksi, Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan.
2. Seksi Sarana dan Prasarana dan Pelayanan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan Surat Izin Kapal

Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dukungan teknis penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

6. Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan

Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana teknis bidang pengawasan kelautan dan perikanan. Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di atas 4 mil. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dan pengendalian terhadap pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan dan perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penangkapan ikan;
- b. Pelaksanaan dan pengendalian terhadap pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian terhadap pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

1. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan dan perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penangkapan ikan.

2. Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
3. Seksi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)

UPTD LPPMHP merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Aceh dan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

UPTD LPPMHP mempunyai tugas melaksanakan sebahagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pembinaan dan pengawasan pemanfaatan fasilitas dan teknis pengolahan, pengujian laboratoris bahan baku, bahan pembantu, pengujian mutu dan kewenangan dalam menerbitkan mutu produk perikanan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, UPTD LPPMHP mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program perencanaan di bidang pengujian dan sertifikasi mutu hasil perikanan,
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan,
- c. Pelaksanaan pemungutan retribusi jasa laboratorium,
- d. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian laboratoris bahan baku, bahan pembantu dan produk akhir hasil perikanan,
- e. Pelaksanaan proses sertifikasi mutu hasil perikanan,
- f. Pelaksanaan uji lapangan terhadap sanitasi dan hygiene unit pengolahan hasil perikanan dan sentra produksi hasil perikanan,
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanganan titik pengendalian kritis (*critical control point*) yang diajukan oleh unit pengolahan ikan untuk penerbitan sertifikat kesehatan sebagai penerapan Program Managemen Mutu Terpadu (PMMT),
- h. Pelaksanaan investigasi terhadap hasil perikanan yang terkena kasus dan pengamabilan contoh dalam rangka sertifikasi produk hasil perikanan.

UPTD LPPMHP terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi dilingkungan UPTD, yang mempunyai fungsi:
 - Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan,
 - Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan,
 - Penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan,
 - Penyiapan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi, dan
 - Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikannya oleh Kepala UPTD.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo

UPTD Pelabuhan Perikanan Lampulo merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

UPTD Pelabuhan Perikanan Lampulo mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan, pengawasan, penataan dan pengembangan serta pelayanan teknis pelabuhan perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program perencanaan di bidang pengelolaan, pengawasan, penataan dan pengembangan serta pelayanan teknis pelabuhan perikanan,
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan,
- c. Pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah dalam kawasan pelabuhan perikanan,
- d. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas prasarana dan sarana pelabuhan perikanan,
- e. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan pelabuhan, kapal dan alat tangkap perikanan serta kesyahbandaran pelabuhan perikanan,
- f. Pelaksanaan pelayanan teknis dan perbengkelan kapal perikanan.
- g. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik perikanan tangkap,
- h. Pelaksanaan fasilitas pemberdayaan masyarakat perikanan tangkap, dan
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

UPTD Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi dilingkungan UPTD yang mempunyai fungsi:
 - Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan,
 - Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan,
 - Penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan,
 - Penyiapan data. Informasi dan penyelenggaraan inventarisasi, dan
 - Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- b. Seksi Penataan dan Pengembangan Pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penataan, pengembangan dan pengawasan operasional perairan dan daratan, keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan pelabuhan perikanan yang mempunyai fungsi:
 - Pelaksanaan penataan, pengembangan dan pengawasan kegiatan pelabuhan,
 - Pelaksanaan pengaturan kapal masuk, keberangkatan, penempatan tambat dan labuh serta bongkar muat kapal di pelabuhan perikanan,
 - Pelaksanaan ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kawasan pelabuhan perikanan,
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan,
 - Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- c. Seksi Pelayanan Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pembangunan, pemeliharaan, penataan, perbekalan dan koordinasi pemanfaatan sarana pelabuhan, perikanan yang mempunyai fungsi:
 - Pelayanan teknis di bidang sarana dan prasarana pelabuhan perikanan,
 - Pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas prasarana dan sarana pelabuhan perikanan,
 - Pelaksanaan pelayanan teknis dan perbengkelan kapal perikanan,
 - Pemeliharaan fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang,
 - Pelaksanaan pengawasan penanganan mutu hasil perikanan tangkap,
 - Pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan dan pelayanan informasi pasar,
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan

- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikannya oleh Kepala UPTD.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi

UPTD Pelabuhan Perikanan Idi merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang berkedudukan di Idi, Kabupaten Aceh Timur dan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. UPTD Pelabuhan Perikanan Idi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan, pengawasan, penataan dan pengembangan serta pelayanan teknis pelabuhan perikanan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi mempunyai fungsi:

- Penyusunan program perencanaan di bidang pengelolaan, pengawasan, penataan dan pengembangan serta pelayanan teknis pelabuhan perikanan.
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
- Pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah dalam kawasan pelabuhan perikanan.
- Pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas prasarana dan sarana pelabuhan perikanan.
- Pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan pelabuhan, kapal dan alat tangkap perikanan serta kesyahbandaran pelabuhan perikanan.
- Pelaksanaan pelayanan teknis dan perbengkelan kapal perikanan.
- Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik perikanan tangkap.
- Pelaksanaan fasilitas pemberdayaan masyarakat perikanan tangkap.
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi terdiri dari:

- Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi dilingkungan UPTD yang mempunyai fungsi:
 - Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan.
 - Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.
 - Penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan.

- Penyiapan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi.
 - Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- b. Seksi Penataan dan Pengembangan Pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, penataan, pengembangan dan pengawasan operasional perairan dan daratan, keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan pelabuhan perikanan yang mempunyai fungsi:
- Pelaksanaan penataan, pengembangan dan pengawasan kegiatan pelabuhan.
 - Pelaksanaan pengaturan kapal masuk, keberangkatan, penempatan tambat dan labuh serta bongkar muat kapal di pelabuhan perikanan.
 - Pelaksanaan ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kawasan pelabuhan perikanan.
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- c. Seksi Pelayanan Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pembangunan, pemeliharaan, penataan, perbekalan dan koordinasi pemanfaatan sarana pelabuhan, perikanan yang mempunyai fungsi:
- Pelayanan teknis di bidang sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.
 - Pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas prasarana dan sarana pelabuhan perikanan.
 - Pelaksanaan pelayanan teknis dan perbengkelan kapal perikanan.
 - Pemeliharaan fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang.
 - Pelaksanaan pengawasan penanganan mutu hasil perikanan tangkap.
 - Pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan dan pelayanan informasi pasar.
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbenihan Budidaya Perikanan Air Tawar (PBPAT)

UPTD PBPAT merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh yang berkedudukan di Batee Iliék Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen dan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. UPTD PBPAT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang peningkatan produksi benih, induk, pengendalian hama dan penyakit ikan air tawar.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, UPTD PBPAT mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program perencanaan di bidang peningkatan produksi benih, induk, pengendalian hama dan penyakit ikan air tawar,
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan,
- c. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah dari hasil usaha budidaya,
- d. Pelaksanaan peningkatan produksi benih dan induk unggul,
- e. Pelaksanaan standarisasi perbenihan,
- f. Pelaksanaan sertifikasi benih,
- g. Pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit,
- h. Pelaksanaan penyebaran teknologi tepat guna budidaya ikan air tawar,
- i. Pembinaan terhadap Unit Pembenihan Rakyat (UPR),
- j. Pelaksanaan domestifikasi jenis ikan lokal ekonomis, dan
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

UPTD PBPAT terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi dilingkungan UPTD yang mempunyai fungsi:
 - Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan,
 - Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan,
 - Penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan,
 - Penyiapan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi, dan
 - Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- b. Seksi Pelayanan Teknis Produksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyediaan sarana, prasarana perbenihan, peningkatan produksi benih dan induk unggul, pengendalian mutu benih untuk menunjang usaha Unit Perbenihan Rakyat (UPR), pengembangan usaha budidaya perikanan air tawar dan pengendalian hama dan penyakit, yang mempunyai fungsi:
 - Pelaksanaan penyediaan sarana, prasarana perbenihan.
 - Pelaksanaan penyediaan dan peningkatan produksi benih dan induk unggul,
 - Pelaksanaan penyebaran teknologi tepat guna budidaya ikan air tawar,
 - Pembinaan terhadap unit perbenihan rakyat,
 - Pelaksanaan domestifikasi dan pelestarian sumber daya ikan,

- Penerapan teknik pengendalian hama dan penyakit,
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan
 - Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- c. Seksi Standardisasi dan Informasi yang mempunyai tugas menyiapkan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang standarisasi dan informasi, yang mempunyai fungsi:
- Penyusunan pedoman kelayakan dasar unit perbenihan dan sosialisasi kepada UPR,
 - Pelaksanaan pengawasan benih, sarana benih dan distribusi benih,
 - Pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi perbenihan,
 - Pelaksanaan pengawasan pelanggaran penggunaan bahan dan obat-obatan terlarang,
 - Pelaksanaan pengawasan peredaran pakan,
 - Pelaksanaan sistem informasi perbenihan melalui penyusunan brosur dan leaflet,
 - Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan magang,
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan
 - Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

11. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Susunan kepegawaian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh hingga tahun 2017 sebanyak 347 orang yang terdiri dari 35 orang pejabat struktural dengan persentase 10%, 202 orang staf dengan persentase 58%, 2 (dua) orang pejabat fungsional (1%), dan 106 orang tenaga kontrak dengan persentase 30%. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Rincian Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Struktural	35	10%
2.	Staf	202	58%
3.	Fungsional	2	1%
4.	Tenaga Kontrak	106	30%
	Jumlah	347	100%

Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian DKP Aceh, 2017

Berdasarkan golongan, jumlah pegawai negeri sipil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sebanyak 237 orang, terdiri dari golongan IV sebanyak 18 orang, golongan III sebanyak 154 orang, golongan II sebanyak 61 orang, dan golongan I sebanyak 4 orang. Lebih jelasnya jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Rincian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
IV	18	7%
III	154	65%
II	61	26%
I	4	2%
Jumlah	237	100 %

Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian DKP Aceh, 2017

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, secara persentase terlihat bahwa jumlah PNS yang terbesar berada pada golongan III sebesar 65 %, golongan II sebesar 26 %, golongan IV sebesar 7 %, dan yang paling rendah golongan I sebesar 2 %. Pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh memiliki persentase tertinggi pada Golongan III sehingga dibutuhkan pelatihan-pelatihan dan pendidikan untuk menunjang peningkatan golongan ke jenjang yang lebih tinggi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh didukung oleh sejumlah aparatur yang memiliki disiplin ilmu dalam berbagai bidang dan strata pendidikan yang mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Disiplin ilmu sesuai dengan

keahlian dan strata pendidikan pada sumber daya manusia penting untuk diperhatikan agar terciptanya kinerja yang efektif, efisien dan berintegrasi. Persentase strata pendidikan pegawai negeri sipil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang terbanyak pada jenjang S1 sebesar 63%, dan yang paling sedikit adalah persentase jenjang S3, D3, SMP dan SD sebesar 1%. Persentase strata pendidikan yang lebih tinggi perlu ditingkatkan lagi untuk menghasilkan Sumber daya manusia yang berkualitas. Rincian jumlah dan persentase pegawai negeri sipil berdasarkan pendidikan disajikan pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2. 3 Rincian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan

Strata Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
S3	1	1%
S2	30	13%
S1	150	63%
D3	3	1%
SMA	48	20%
SMP	2	1%
SD	3	1%
Jumlah	237	100%

Sumber: Subbag. Umum & Kepegawaian, DKP Aceh, 2017

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya juga menyediakan sarana pelayanan umum untuk memfasilitasi masyarakat kelautan dan perikanan dalam menjalankan usahanya demi meningkatkan produk perikanan yang dihasilkan dan bernilai jual tinggi. Adapun sarana pelayanan yang dimaksud adalah beberapa UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) meliputi BBI (Balai Benih Ikan), PPS (Pelabuhan Perikanan Samudera), PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara), PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) dan LPPMHP (Laboratorium Pembinaan Pengujian Mutu Hasil Perikanan). Sarana Pelayanan Umum DKP Aceh beserta lokasinya yang dimaksud sesuai dengan Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2. 4 Sarana Pelayanan Umum DKP Aceh

No.	Sarana Pelayanan Umum	Jumlah	Lokasi
1.	UPTD PPS Lampulo	1 (satu)	Kota Banda Aceh
2.	UPTD PPN Idi	1 (satu)	Kab. Aceh Timur
3.	UPTD LPPMHP	1 (satu)	Kota Banda Aceh
4.	UPTD BBI Batee Iliiek	1 (satu)	Kab. Bireuen
5.	BBI Sentral Toweran	1 (satu)	Kab. Aceh Tengah
6.	BBI Lawe Bekung	1 (satu)	Kab. Aceh Tenggara

No.	Sarana Pelayanan Umum	Jumlah	Lokasi
7.	BBIP Simeulue	1 (satu)	Kab. Simeulue

Sumber: Subbag Umum & Kepegawaian, DKP Aceh, 2017

Ketersediaan sarana dan fasilitas juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, disamping sumber daya manusia yang profesional. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh telah dilengkapi sarana dan fasilitas yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung sudah memiliki gedung sendiri, namun dalam kondisi tidak layak untuk mendukung pelaksanaan tugas. Sarana mobilitas dan perangkat pendukung juga sudah tersedia pada DKP Aceh seperti tanah, bangunan gedung, kendaraan roda dua dan empat, alat kantor rumah tangga, mesin diesel, dan alat studio. Sarana mobilitas dan perangkat pendukung lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2. 5 Sarana Mobilitas dan Perangkat Pendukung Lainnya

No	Uraian	Unit
1.	Tanah	70 persil
2.	Bangunan Gedung	12 unit
3.	Kendaraan roda dua	24 unit
4.	Kendaraan roda empat	25 unit
5.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Komputer (PC)	± 42 unit
	- Laptop	± 70 unit
	- Overhead Projector	± 15 unit
	- Printer	± 25 unit
	- Tabung pemadam api	± 19 unit
6.	Mesin diesel	4 unit
7.	Alat Studio	5 paket

Sumber: Subbag. Keuangan & Aset, DKP Aceh, 2017

Prasarana gedung kantor yang saat ini menjadi lokasi kantor utama Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dipandang tidak cukup untuk mengakomodir jumlah karyawan/ti yang ada secara menyeluruh jika ditinjau dari kelayakan dan keleluasaan ruang gerak. Hal ini disebabkan faktor bangunan yang sudah tua dan dianggap tidak layak sehingga dibutuhkan gedung kantor yang baru untuk dapat menjalankan kinerja dan mengakomodir sumberdaya manusia yang ada di DKP Aceh.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

Kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan dapat diukur dari capaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, secara umum capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan telah terealisasi sesuai target yang ditentukan walaupun ada beberapa indikator yang pencapaiannya tidak sesuai target yang diinginkan. Pelayanan yang diberikan tidak terlepas dengan pembiayaan dari APBA maupun APBN. Indikator kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sepanjang tahun 2012 - 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Berdasarkan Tabel 2.6. dapat dijelaskan enam indikator kinerja utama Dinas kelautan dan Perikanan Aceh yang meliputi nilai produksi perikanan, tingkat konsumsi ikan, kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB, cakupan bina kelompok nelayan, produksi perikanan kelompok nelayan, dan nilai tukar nelayan (NTN).

Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPA	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Produksi Perikanan (Ton)				269.847	279.353	307.288	335.224	363.159	186.749	202.860,3	218.874	238.874,8	265.039,7	69,21	72,62	71,02	71,26	72,98
2	Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)				41,00	41,51	41,76	42,06	42,36	41,50	42,00	43,07	45,88	50,08	101,22	101,18	103,14	109,08	118,22
3	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB (%)				4,45	4,47	4,49	4,55	4,57	4,53	4,51	4,51	4,87	4,83	101,80	100,89	100,45	107,03	105,69
4	Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)				40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	20,00	30,00	50,00	73,00	271,00	50,00	60,00	83,33	104,29	338,75
5	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)				140.635	143.680	158.048	172.416	186.784	141.680,2	148.764	15.391,6	161.051,2	177.615,3	100,74	103,54	9,74	93,41	95,09
6	Nilai Tukar Nelayan (NTN)				108,00	109,35	109,60	109,85	110,10	99,95	98,89	100,66	97,48	97,86	92,55	90,43	91,84	88,74	88,88

Sumber : Subbag. Program, Informasi & Humas DKP Aceh; 2017

2.3.1. Produksi Perikanan

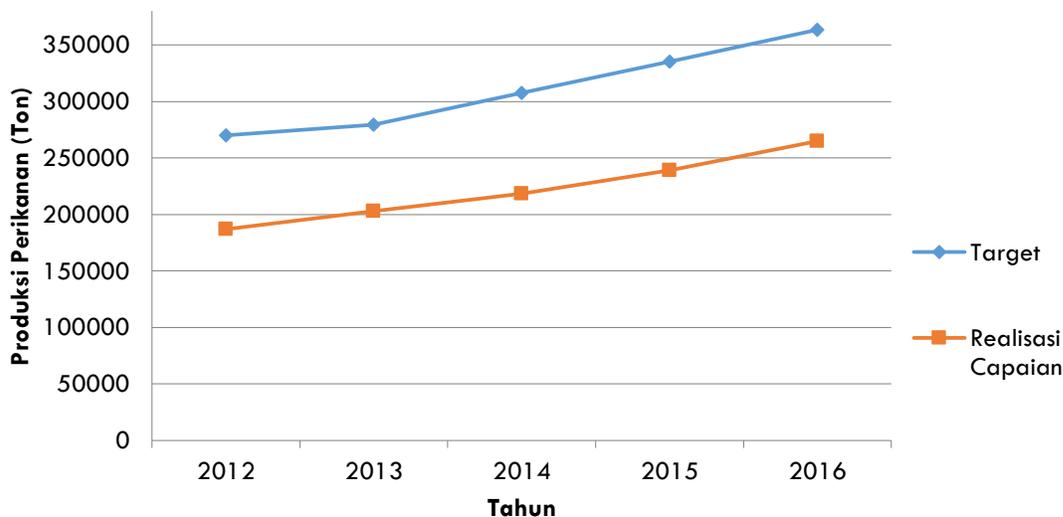
Salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang termuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2016 maka pelaksanaan Visi Misi dalam mencapai sasaran kinerja adalah pertumbuhan produksi perikanan. Sub sektor perikanan merupakan salah satu sektor andalan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA). Selama kurun waktu 2012 – 2016, produksi perikanan Aceh rata-rata meningkat 9.06 % setiap tahunnya yaitu dari 187,401.21 ton pada tahun 2012 menjadi 265.039,7 ton pada tahun 2016. Capaian produksi perikanan Aceh diperoleh dari kontribusi produksi perikanan tangkap dan budidaya yang terus mengalami kenaikan selama periode tahun 2012 – 2016. Peningkatan produksi perikanan selama tahun 2012 – 2016 disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Volume produksi perikanan Aceh tahun 2012-2016 (ton)

Rincian	Volume Produksi Perikanan Aceh 2012 - 2016					Kenaikan rata-rata (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	
Total Produksi	187,401.21	202,099.59	218,310.45	238,875.20	265,039.70	9.06
Penangkapan	147,185.78	155,270.39	159,487.45	174,793.30	180,872.60	5.32
Perikanan Laut	145,833.78	153,692.29	157,943	173,066.90	178,963.58	5.28
Perairan Umum	1,352.00	1,578.10	1,543.78	1,726.40	1,909.02	9.24
Budidaya	40,215.44	46,829.20	58,823.00	64,081.90	84,167.10	20.59
Budidaya Laut	50.3	60.8	70.4	88.7	92.1	16.62
Tambak	27,619.70	32,582.30	37,650.60	40,115.40	54,018.50	18.68
Kolam	10,986.80	12,751.80	18,930.00	21,170.60	20,813.10	18.67
Keramba	252.8	260.2	555.8	685.4	3,750.10	146.75
Jarring Apung	224.3	240.2	465.6	559.7	3,286.00	152.06
Sawah	1,081.60	933.9	1,150.60	1,462.10	2,204.30	21.85

Sumber: Subbag. Program, Informasi & Humas, DKP Aceh 2017

Gambaran realisasi capaian dan target capaian produksi perikanan dalam kurun waktu 2012 – 2016 disajikan pada Gambar 2.1.

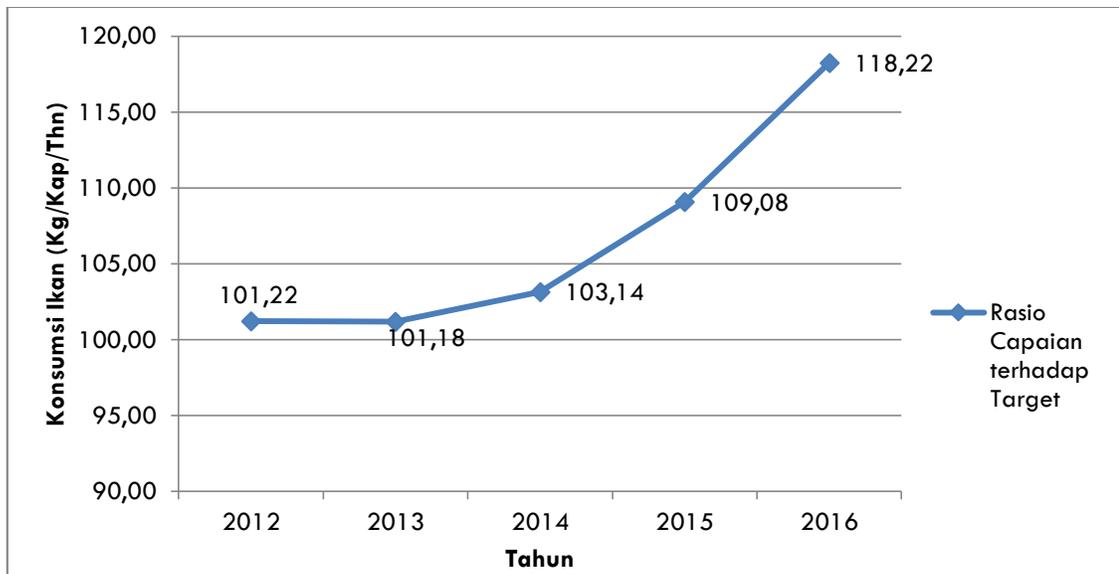


Gambar 2.1 Produksi Perikanan (Ton) tahun 2012 – 2016

Pada Gambar 2.1 terlihat realisasi capaian peningkatan produksi perikanan setiap tahunnya walaupun peningkatan produksi perikanan ini belum mencapai target yang telah ditentukan. Kesenjangan ini diduga belum optimalnya pemanfaatan teknologi oleh nelayan, belum optimalnya manajemen usaha nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan serta masih rendahnya implementasi dan manajemen mutu hasil perikanan.

2.3.2. Konsumsi Ikan

Pada tahun 2012, capaian rata-rata konsumsi ikan perkapita Aceh sebesar 41,50 Kg/Kap/Tahun dan meningkat tajam pada tahun 2016 yaitu sebesar 50,08 Kg/Kap/Thn. Peningkatan nilai ini melebihi capaian rata-rata konsumsi ikan perkapita nasional pada tahun 2015 yaitu 47 Kg/Kap/Tahun. Angka capaian rata-rata konsumsi ikan perkapita Aceh pada tahun 2016 setara dengan target tahun 2018 yang ditentukan didalam Renstra KKP Tahun 2015 -2019 untuk rata-rata konsumsi ikan perkapita Nasional yaitu sebesar 50,65 Kg/Kap/Thn. Capaian ini tidak terlepas dari peningkatan produksi perikanan Aceh. Gambaran rasio realisasi capaian tingkat konsumsi ikan per kapita Aceh terhadap target yang ditentukan disajikan pada Gambar 2.2.



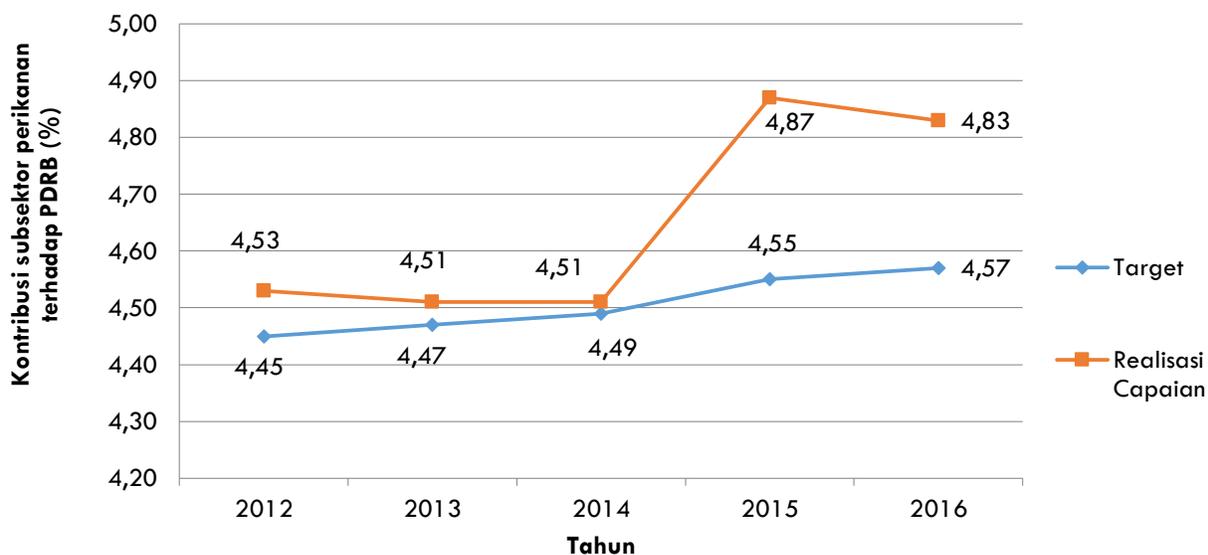
Gambar 2. 2 Rasio Realisasi Capaian dan Target Tingkat Konsumsi Ikan Perkapita Aceh

Realisasi capaian rata-rata konsumsi ikan perkapita Aceh memenuhi target yang ditentukan dan menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi. Hal ini dapat terlihat dari rasio capaian yang melebihi 100 % setiap tahun dan meningkat drastis pada tahun 2016. Peningkatan konsumsi ikan tersebut menggambarkan bahwa ketersediaan produk perikanan yang berasal dari kegiatan penangkapan ikan (*capture*) maupun budidaya (*aquaculture*) tersedia dengan baik. Selain itu, peningkatan tersebut juga menggambarkan bahwa kebijakan peningkatan konsumsi ikan Aceh, pengembangan sarana pemasaran hasil perikanan, penguatan kelembagaan dan jaringan pemasaran, penguatan informasi pemasaran dalam negeri serta kerjasama pemasaran di dalam negeri berjalan dengan baik.

2.3.3. Kontribusi Subsektor Perikanan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Sub Sektor Perikanan memegang peranan strategis dalam memberikan kontribusi bagi PDRB Aceh. Besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diperoleh dari tahun ke tahun memberikan gambaran terhadap perkembangan perekonomian Aceh. Kontribusi sub sektor perikanan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh secara keseluruhan. Meskipun secara agregat kontribusinya masih rendah bila dibandingkan dengan sub sektor pertanian lainnya seperti perkebunan. Namun pencapaiannya masih sangat diperhitungkan sebagai sub sektor yang memiliki daya ungkit besar terhadap perekonomian Aceh. Perkembangan kontribusi sub sektor perikanan dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung memiliki trend fluktuatif, dimana pada tahun 2012 kontribusinya sebesar 4,53 persen dan menurun lambat menjadi 4,51

persen pada tahun 2014. Namun kontribusi tersebut meningkat cukup tajam pada tahun 2015 dengan kontribusi sebesar 4,87 persen. Namun pertumbuhan kontribusi ini mengalami penurunan sebesar 0,04 persen pada tahun 2016 dengan nilai kontribusi sebesar 4,83 persen. Besarnya nilai kontribusi sektor perikanan tersebut sangat dipengaruhi oleh akumulasi dari semua aktivitas perikanan terutama dalam capaian produksi perikanan tangkap maupun budidaya. Perkembangan kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB disajikan pada Gambar 2.3.



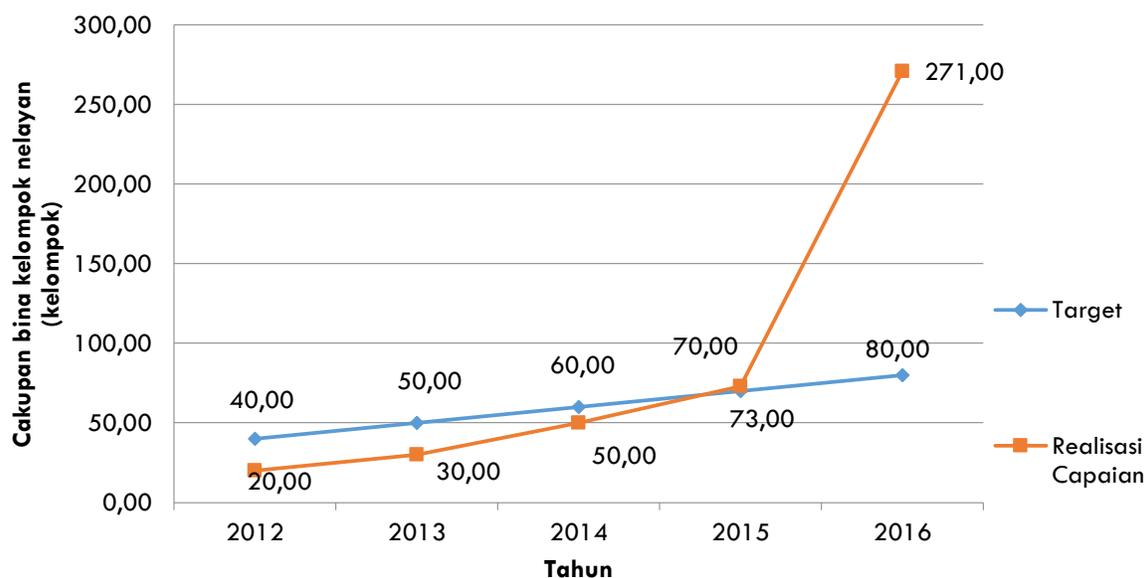
Gambar 2. 3 Perkembangan Kontribusi Sub Sektor Perikanan Aceh 2012-2016

Bila dilihat dari perkembangannya, peningkatan sub sektor perikanan ditargetkan akan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam periode lima tahun mendatang. Hal tersebut dikarenakan potensi perikanan terutama kehadiran Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo sebagai salah satu kawasan industri perikanan Aceh akan memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh dimasa yang akan datang.

2.3.4. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Aceh yaitu melalui peningkatan produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan produk olahan perikanan. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini terlihat dari besarnya kelompok yang dibina baik dari segi keahlian maupun pendanaan. Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat

dampingan juga menjadi bagian penting dalam program prioritas DKP Aceh yaitu melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap melalui pelatihan teknis maupun manajemen. Perkembangan cakupan bina kelompok nelayan tahun 2012 – 2016 disajikan pada Gambar 2.4.



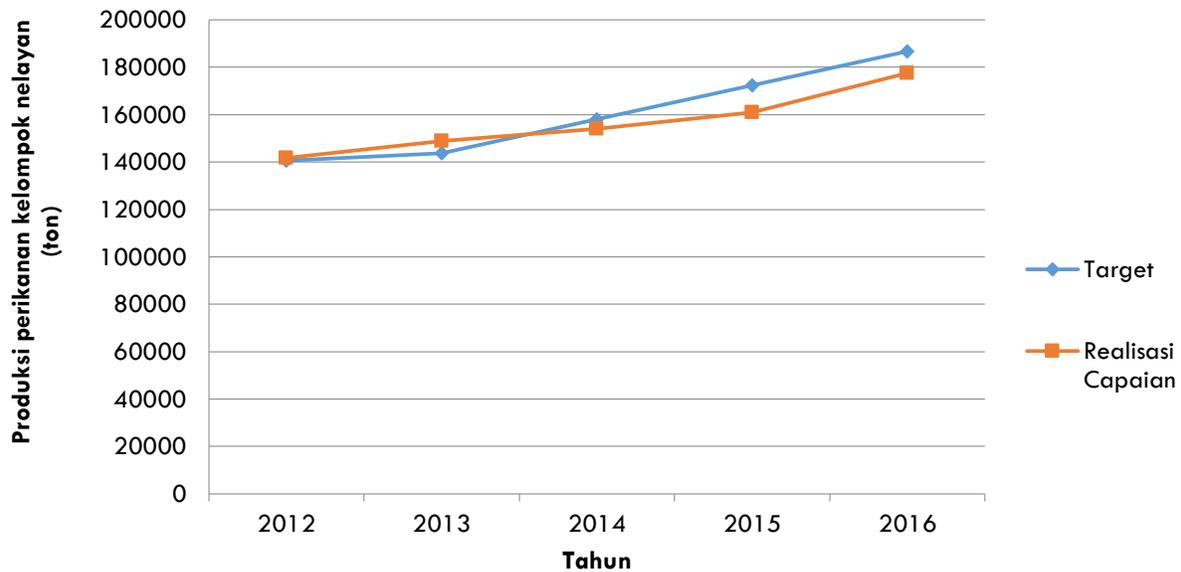
Gambar 2. 4 Perkembangan cakupan bina kelompok nelayan tahun 2012 – 2016

Cakupan bina kelompok nelayan mengalami peningkatan yang sangat tajam sebesar 198 kelompok pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. Angka binaan kelompok tahun 2015 sebesar 73 kelompok dan tahun 2016 sebesar 271 kelompok. Peningkatan jumlah kelompok yang dibina tidak terlepas dari ketersediaan anggaran. Walaupun demikian cakupan kelompok binaan pada tahun 2012 – 2014 belum mencapai target yang telah ditentukan, sehingga pada tahun 2015 – 2016 adanya peningkatan jumlah kelompok yang dibina melebihi target yang ditetapkan. Kegiatan pembinaan dilakukan dapat berupa penyuluhan, sosialisasi, pembinaan secara intensif, inovasi teknologi, demonstrasi, magang dan bimbingan. Selain itu juga dilakukan penguatan kelembagaan kelompok serta pemberian bantuan peralatan dan sarana produksi perikanan lainnya.

2.3.5. Capaian Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Nilai produksi perikanan kelompok nelayan merupakan indikator yang digunakan untuk melihat jumlah produksi ikan yang berasal dari hasil kelompok nelayan terhadap jumlah produksi ikan di provinsi Aceh setiap tahunnya. Secara keseluruhan cakupan produksi hasil perikanan

kelompok nelayan sudah tercapai dengan baik. Hal ini terlihat dari nilai realisasi hampir mencapai nilai target yang diinginkan. Jika ditinjau dari realisasi capaian, setiap tahunnya mengalami peningkatan hasil produksi perikanan dari kelompok nelayan yaitu pada tahun 2012 sebesar 141680.2 ton dan menjadi 177615.3 ton pada tahun 2016. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 35935 ton. Kemajuan ini tidak terlepas dari kontribusi adanya binaan kelompok nelayan yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya.



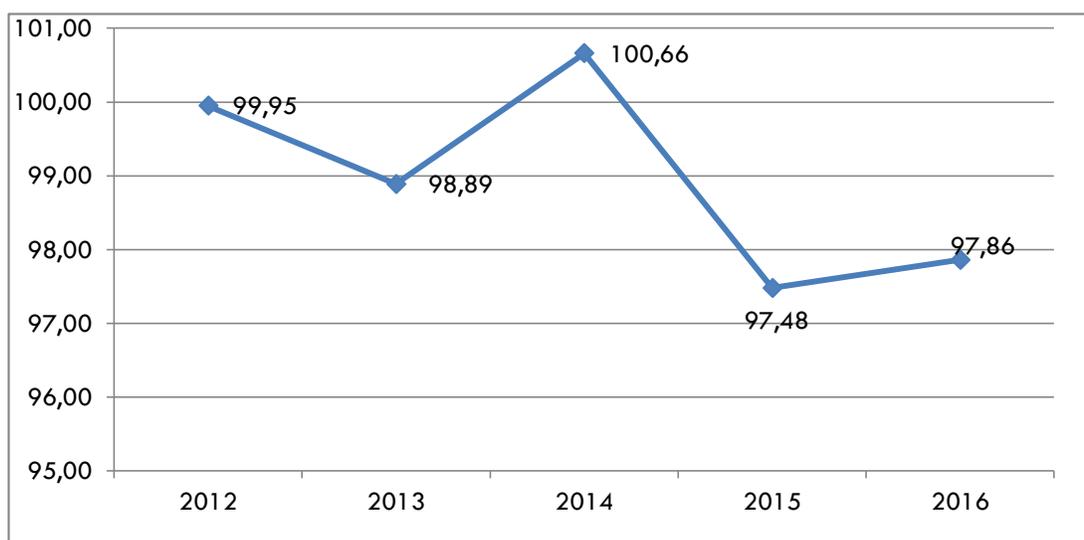
Gambar 2. 5 Nilai Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Meskipun adanya peningkatan nilai produksi perikanan kelompok nelayan setiap tahunnya namun perlu terus dilakukan upaya pembinaan kepada kelompok nelayan Aceh secara merata sehingga dapat meningkatkan kontribusi dalam perkembangan perekonomian Aceh. Peningkatan produksi perikanan selama ini masih terbatas pada produk segar sehingga perlu dilakukan binaan terhadap peningkatan nilai tambah pada produk olahan. Upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan produksi olahan yang bermutu dan mempunyai daya saing yaitu dengan mengoptimalkan peran sentra-sentra industri pengolahan dengan didukung melalui pembinaan dan pemenuhan sarana dan prasarana pengolahan dan sistem rantai dingin, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta peningkatan produktivitas dan kepatuhan terhadap sistem manajemen mutu hasil perikanan.

2.3.6. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Cerminan dari keberhasilan pembangunan perikanan akan tergambar dari besarnya tingkat kesejahteraan nelayan baik nelayan tangkap maupun pembudidaya ikan. Tingkat kesejahteraan tersebut merupakan implikasi dari besarnya pendapatan yang mereka peroleh dari aktivitas produksi dan kemampuan yang mereka keluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk konsumsi. Secara garis besar, besaran tingkat kesejahteraan tersebut akan diukur melalui Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang merupakan nilai rasio dari besarnya Indeks yang diterima nelayan (I_t) terhadap Indeks yang dikeluarkannya (I_b).

Bila dilihat dari perkembangannya dalam kurun waktu 2012 – 2016, NTN nelayan gabungan (perikanan tangkap dan budidaya) memiliki nilai yang sangat fluktuatif, dimana nilai tertinggi terdapat pada tahun 2014 sebesar 100,66 dan nilai terendah terdapat pada tahun 2015 (97,48). Meskipun secara garis besar NTN sangat ditentukan oleh produksi perikanan yang merupakan gambaran dari besarnya nilai yang diterima nelayan, namun besaran inflasi juga sangat menentukan dari besarnya pengeluaran yang nelayan keluarkan untuk konsumsi. Penurunan NTN secara drastis pada tahun 2015 diduga dipengaruhi dari penurunan laju inflasi yang terjadi pada tahun 2014 dan 2015 sebesar 8,09 dan 1,53. Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN) disajikan pada Gambar 2.6



Gambar 2. 6 Perkembangan Nilai Tukar Nelayan (NTN)
Sumber : BPS Aceh, berbagai tahun

Pencapaian NTP yang berfluktuatif dari tahun ke tahun juga menggambarkan bahwa secara umum nilai produksi nelayan Aceh masih sangat dipengaruhi oleh nilai pasar yang cenderung mengikuti pengaruh musim. Sehingga sebagian besar nelayan seharusnya mampu memanfaatkan kondisi tersebut dengan meningkatkan nilai tambah produk perikanan melalui produk olahan dengan nilai yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan menjual ikan tanpa diversifikasi produk olahan. Dalam peningkatan nilai tambah produk perikanan tersebut, nelayan perlu dibekali dengan pengetahuan dan teknologi pengolahan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sehingga berdampak terhadap kesejahteraannya.

2.4 Kinerja Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan di tahun 2012 sampai dengan 2016 terdiri dari Belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari gaji dan tunjangan, dan tambahan penghasilan PNS. Belanja langsung dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami sedikit perubahan sehingga terjadi perbedaan program-program yang telah dijalankan untuk setiap tahunnya, pada tahun 2012 adanya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, sedangkan pada tahun 2013 sampai dengan 2016 program tersebut sudah ditiadakan. Program-program ini disesuaikan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirangkum oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2016, belanja langsung terdiri dari program dan kegiatan rutin dan spesifik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBA) tahun 2016. Program Rutin terdiri dari 2 (dua) program yang pada setiap tahunnya mendapatkan anggaran yaitu Program Pelayanan Administrasi Pekantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara, sedangkan Program Spesifik terdiri atas 6 (enam) program yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan, Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, dan Program Pembangunan Perencanaan Ekonomi.

Tabel 2.8 memaparkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Aceh pada tahun 2012 sampai dengan 2016 baik untuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung (Program Rutin dan Program Spesifik). Alokasi anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan di tahun 2016 sebesar Rp. 296.013.708.792,- dengan target realisasi

sebesar 96%. Pagu anggaran DKP ini dialokasikan untuk 10 (sepuluh) program pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi anggaran Dinas Keuangan Aceh, realisasi anggaran DKP Aceh sampai dengan akhir tahun 2016 mencapai nilai sebesar Rp. 273.442.448.110,- atau 92,37% dari anggaran yang diberikan sebesar Rp. 293.124.305.160,-. Realisasi anggaran DKP Aceh tahun 2016 lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2015 sebesar 95,83% dengan anggaran sebesar Rp. 271.685.204.719,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 260.356.137.053,-.

Berdasarkan kajian secara umum ada beberapa penyebab tidak tercapainya target serapan anggaran pada tahun 2016 dikarenakan :

- a. Terdapat sisa anggaran pada belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, hal ini dikarenakan masihnya banyak kelompok masyarakat yang menjadi penerima bantuan tidak dapat melengkapi administrasi persyaratan penerimaan seperti kelompok yang mempunyai badan hukum; dan
- b. Terdapat sisa anggaran untuk hari layar kapal pengawas perikanan karena tidak terealisasinya operasi pengawasan terpadu.

Realisasi keuangan DKP Aceh pada tahun 2014 sebesar Rp. 244.605.235.578,- atau mencapai 94,81% dari alokasi anggaran Rp. 257.997.109.629,- yang mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 0,35%. Pada tahun 2013 anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan kelautan dan perikanan sebesar Rp. 294.063.098.807,- dan realisasi anggaran keuangan DKP Aceh di tahun 2013 sebesar Rp. 279.836.014.893,- atau mencapai 95,16%, dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2012 yang realisasinya sebesar 93,13%. Kinerja penyerapan anggaran belum mampu memenuhi rencana, yaitu hanya mampu mencapai 94,81% dari rencana >95,00%. Tertekannya kinerja penyerapan anggaran pada tahun 2014 merupakan kontribusi terbesar dari kurang maksimalnya kinerja belanja jasa. Selain kinerja dari belanja, kinerja Bidang Tangkap dan Bidang Budidaya juga punya pengaruh terhadap tertekannya kinerja penyerapan anggaran.

Tabel 2.8 juga memaparkan rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh. Pada belanja tidak langsung rasio antara realisasi dan anggaran pada setiap tahun yang dimulai pada tahun 2012 sampai dengan 2016 untuk masing-masing adalah 98%, 97%, 87%, 86%, dan 98%, sedangkan

untuk belanja langsung adalah 91%, 95%, 96%, 97%, dan 92%. Prestasi kinerja keuangan DKP Aceh pada setiap tahunnya dapat dikatakan baik karena rasio antara realisasi dan anggaran sudah mencapai 90%. Rasio antara realisasi dan anggaran kurang baik pada tahun 2014 dan 2015 pada belanja tidak langsung yaitu kurang dari 90%, hal ini dikarenakan kinerja penyerapan anggaran pada tahun 2014 dan 2015 belum mampu terserap dengan baik khususnya pada gaji dan tunjangan, dan tambahan penghasilan PNS khususnya pada tahun 2015 yaitu sebesar 80%. Rendahnya rasio antara realisasi dan anggaran diakibatkan dari belanja pegawai yang tidak sesuai antara anggaran dan realisasi dimana anggaran yang tersedia berlebih seperti kegiatan tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 7.809.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 6.047.157.500,- dan Tunjangan Fungsional Umum memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 589.123.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 482.260.000,-.

Tabel 2. 8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Belanja Tidak Langsung	19.105.871.233	20.061.164.784	23.084.992.630	23.290.141.520	21.627.794.861	18.738.391.229	19.483.807.752	20.179.783.715	20.143.810.027	21.096.973.862	98,08	97,12	87,42	86,49	97,55	17.806.620.614	17.349.295.616
Gaji dan Tunjangan	9.561.061.223	10.373.404.784	13.254.042.630	14.613.241.520	13.009.094.861	9.561.061.223	10.373.404.784	11.326.676.215	11.717.666.176	13.009.577.925	100,00	100,00	85,46	80,19	100,00	11.096.882.616	11.097.365.680
Tambahan Penghasilan PNS	9.544.810.000	9.687.760.000	9.830.950.000	8.676.900.000	8.618.700.000	9.177.330.006	8.718.250.000	8.853.107.500	6.964.557.500	8.087.395.937	96,15	89,99	90,05	80,27	93,84	6.709.738.000	6.251.929.936
Belanja Langsung	145.504.305.839	274.001.934.023	234.912.116.999	248.395.063.199	274.385.913.931	132.915.837.845	260.352.207.141	224.425.451.863	240.212.327.026	252.345.474.248	91,35	95,02	95,54	96,71	91,97	245.285.052.763	225.762.306.679
Program Pelayanan Administrasi Pe Kantoran	3.506.928.845	3.967.613.988	5.840.932.375	5.187.480.000	5.548.858.425	3.498.963.254	3.952.383.841	5.316.792.520	4.543.130.875	5.130.212.518	99,77	99,62	91,03	87,58	92,46	4.847.472.656	4.430.419.867
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.227.100.000	411.400.000	1.160.440.000	1.473.400.000	19.712.040.000	1.211.716.135	409.400.000	1.121.699.680	1.439.773.450	8.243.428.686	98,75	99,51	96,66	97,72	41,82	19.466.620.000	8.001.085.459
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	152.437.500	319.837.500	1.485.000.000	203.500.000	-	146.515.500	319.520.000	147.740.000	203.350.000	-	96,12	99,90	9,95	99,93	-	173.012.500	166.721.125
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	29.500.000	55.000.000	204.800.000	126.500.000	-	29.500.000	51.500.000	135.095.700	62.000.000	-	100,00	93,64	65,96	49,01	-	120.600.000	54.625.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	161.250.000	-	-	-	-	160.053.500	-	-	-	-	99,26	-	-	-	-	129.000.000	-
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	805.620.000	879.000.000	771.450.000	286.100.000	240.150.000	804.379.000	876.457.500	767.593.700	285.300.000	212.630.000	99,85	99,71	99,50	99,72	88,54	79.026.000	51.754.200
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	1.052.380.000	1.171.000.000	620.850.000	1.710.540.000	1.436.886.000	874.957.000	720.700.200	608.008.150	1.502.500.000	1.150.834.500	83,14	61,55	97,93	87,84	80,09	1.226.410.000	975.843.100
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	40.979.675.528	59.193.412.057	114.829.310.159	124.983.379.000	129.764.276.083	38.907.118.526	57.345.663.698	111.383.030.204	122.571.991.800	127.971.103.000	94,94	96,88	97,00	98,07	98,62	121.568.340.977	120.189.679.295
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	91.999.443.966	198.988.739.478	102.558.912.465	98.884.680.587	112.017.045.508	81.640.720.700	187.931.314.282	96.926.014.094	94.676.599.980	104.303.318.245	88,74	94,44	94,51	95,74	93,11	93.617.156.715	87.975.174.105
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	5.589.970.000	8.507.857.000	7.220.320.000	12.460.595.500	3.674.333.103	5.588.144.230	8.241.652.800	6.591.567.800	11.986.853.370	3.608.084.899	99,97	96,87	91,29	96,20	98,20	2.556.339.103	2.490.456.053
Program Pembangunan Perencanaan Ekonomi	-	508.074.000	1.556.602.000	3.078.888.000	1.992.324.812	-	503.614.820	1.427.910.015	2.940.827.551	1.725.862.400	-	99,12	91,73	95,52	86,63	1.890.710.012	1.599.958.695

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

Pembangunan dibidang kelautan dan perikanan yang optimal dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi persentase pengangguran di Provinsi Aceh, hal ini mengingat potensi sumberdaya alam yang tersedia sangat besar. Terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan pokok dalam pengembangan kegiatan pembangunan dibidang kelautan dan perikanan. Sumberdaya manusia yang ada kurang memadai dan sarana serta prasarana yang ada sekarang masing belum cukup menunjang kegiatan kelautan dan perikanan hal ini dapat dilihat dengan masih rendahnya penerapan teknologi pada setiap kegiatan usaha perikanan baik bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan.

Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh memiliki tantangan dan peluang. Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi terhadap perencanaan lima tahun ke depan. Sehingga berdasarkan pokok permasalahan diatas dan telaahan beberapa dokumen maka diperlukan analisa dan kajian mengenai tantangan dan peluang pengembangan perangkat daerah.

2.5.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah :

1. Provinsi Aceh merupakan daerah yang terletak di ujung bagian barat pulau Sumatera yang dikelilingi oleh lautan yaitu Samudera Hindia di wilayah barat-selatan Aceh, serta Selat Malaka dan Perairan Andaman di wilayah Utara-Timur Aceh. Panjang pantai Aceh mencapai 2.666,27 Km dan luas perairan laut Aceh mencapai 295.370 km². Meninjau luasnya wilayah perairan laut Aceh, maka diprediksikan bahwa masih luas wilayah perairan yang belum tereksplorasi sehingga potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Aceh masih besar.
2. Sejumlah besar aparaturnya Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh memiliki pendidikan yang berkompentensi sehingga mampu mencari solusi dari segala permasalahan dalam upaya mensejahterakan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3. Masyarakat mulai memahami bahwa sumber daya kelautan dan perikanan merupakan bahagian terpenting dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat.
4. Aceh memiliki Lembaga Adat Laot yang berperan dalam pengawasan sumber daya kelautan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Berbagai kearifan lokal yang dihasilkan oleh

lembaga ini juga mendukung kegiatan konservasi sumber daya laut yang mengarah kepada kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

5. Degradasi lingkungan sensitive (mangrove, terumbu karang) dan penurunan produktivitas perairan serta masih maraknya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (destructive fishing).
6. Masih tingginya ketergantungan pada input dari luar yang membuat pelaku usaha perikanan khususnya pembudidaya ikan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi produk yang datang dari luar seperti penyediaan pakan dan sarana produksi lainnya.
7. Masih belum optimalnya penyediaan sarana prasarana pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

2.5.2 Peluang

Peluang yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembangunan sektor Kelautan dan perikanan adalah :

1. Kemauan masyarakat untuk belajar mulai tumbuh.
2. Minat masyarakat untuk memahami teknologi sangat tinggi.
3. Kerjasama masyarakat dalam mengawasi sumber daya kelautan terbuka lebar dengan membentuk kelompok masyarakat pengawas.
4. Peluang Usaha budidaya laut dan budidaya payau serta budidaya air tawar terbuka lebar.
5. Unit pembenihan rakyat mulai diminati masyarakat.
6. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik serta sertifikasi tambak
7. Dukungan terhadap pengelolaan bersama sudah mulai terbentuk dalam masyarakat terutama nelayan dan petambak.
8. Mulai memahami pentingnya informasi pasar dalam menentukan harga jual.
9. Tersedianya lahan yang belum dimanfaatkan.
10. Terdapatnya Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) yang bergerak dalam pelayanan sektor perikanan

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh. Sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh disebutkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah Aceh dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Aceh.

Dalam melaksanakan pembangunan bidang kelautan dan perikanan dijumpai masalah-masalah yang mendasar agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Setelah dilakukan pengkajian data, evaluasi dan analisa yang mendalam dari pembangunan kelautan dan perikanan dapat dirangkum beberapa permasalahan pokok yang perlu dikaji. Isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan di masa lima tahun mendatang. Informasi berdasarkan permasalahan dan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi dipaparkan pada sub bab berikut.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Suatu permasalahan dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan kinerja pada setiap bidang yang berada pada susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh maka rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Identifikasi permasalahan yang telah ditelaah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3. 1 Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1.	Sarana dan prasarana lembaga dinas kelautan dan perikanan yang masih belum layak	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan arsip aktif belum memadai; • Pengelolaan aset Dinas belum maksimal; • Kajian perencanaan pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan belum optimal 	Belum optimalnya penerapan disiplin dalam manajemen administrasi pada bidang kesekretariatan
2	Sumberdaya Manusia yang masih terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan sumber daya manusia pada DKP Aceh menurut bidang keahlian dan jenjang pendidikan yang dibutuhkan masih terbatas; • Pelatihan dan pendidikan dalam meningkatkan kapasitas aparatur perlu ditingkatkan; 	Rekrutment dan penjarangan sumberdaya manusia belum optimal
3	Sarana dan prasarana penangkapan ikan seperti armada perikanan, alat tangkap dan pengelolaan sumberdaya ikan yang masih kurang sehingga membatasi kegiatan perikanan tangkap; serta sarana prasarana pelabuhan yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar nelayan masih tergolong sebagai nelayan kecil dan sarana penangkapan yang digunakan berukuran dibawah 10 GT dengan wilayah penangkapan 4 mil; • Perlindungan terhadap nelayan kecil, pembudidaya dan petani garam masih kurang • Belum dimanfaatkannya lahan penangkapan ZEE secara optimal oleh masyarakat nelayan; • Belum memadainya infrastruktur pelabuhan; • Kurangnya kajian mengenai sumber daya ikan 	Belum optimalnya perencanaan dan pendanaan sarana dan prasarana serta infrastruktur pada bidang perikanan tangkap dan pelabuhan perikanan
4	Sarana pendukung dan infrastruktur perikanan budidaya,	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan budidaya yang belum memadai; 	Belum optimalnya perencanaan dan pendanaan sarana dan

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
	pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang belum tersedia secara optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi dalam pengelolaan kawasan budidaya belum optimal • Standar Mutu hasil dan produk perikanan belum sepenuhnya mengikuti standar pasar global; • Akses pasar yang masih terbatas dan nilai tambah produk yang belum optimal; • Terdapatnya lahan budidaya yang terbengkalai dan belum dikelola secara optimal oleh pembudidaya ikan; • Penyebaran penyakit pada kawasan budidaya masih tinggi; • Harga Pakan ikan masih tinggi khususnya untuk pakan buatan; 	<p>prasarana serta infrastruktur pada bidang budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan</p> <p>Sebagian pembudidaya ikan masih mengalami kekurangan modal/dana;</p>
5	Belum optimalnya kebijakan dalam pemanfaatan potensi budidaya laut	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian kawasan untuk budidaya laut masih belum optimal • Terdapatnya kawasan pesisir sebagai lahan terlantar yang belum dimanfaatkan secara optimal pada sector perikanan budidaya 	Fungsi dan peran kelembagaan pembudidaya dan perbenihan masih belum optimal.
6	Pengolahan dan produksi hasil perikanan belum berjalan dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya Regulasi yang mengatur distribusi dan sistem logistik produk perikanan; 	Sistem logistik produk perikanan yang belum optimal
7	Belum terselesaikannya dokumen RZWP3K, RSWP3K, dan RPWP3K, dan RAPW3K	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan sistem Pengelolaan Ruang Pesisir dan pulau pulau kecil belum optimal; • Degradasi lingkungan pesisir dan laut; • Penanganan Ikan yang dilindungi masih belum optimal; • Belum jelasnya penetapan zonasi pemanfaatan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; 	Waktu dan proses kajian yang mendalam mengenai tata kelola wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
8	Belum terpusatnya/focus perencanaan program jasa pada bidang kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan jasa pada bidang kelautan dan pesisir belum ada seperti wisata bahari, pipa dan kabel bawah laut, reklamasi pantai, Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan bangunan laut; 	Belum terencana dan terprogram dengan baik dikarenakan penerapan SOTK yang baru
9	Pemberdayaan masyarakat pesisir belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan masyarakat pesisir seperti Pembinaan usaha garam rakyat belum optimal; • Fungsi dan Peran DKP Aceh sebagai Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat pesisir belum optimal. 	Sosialisasi peran dan pemberdayaan masyarakat pesisir belum optimal
10	Kasus <i>Illegal Unregulated and Unreported (IUU) fishing</i> masih tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pembinaan tentang pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan; • Sumber Daya Manusia dan kapasitas aparaturnya pengawasan kelautan dan perikanan masih rendah; • Belum optimalnya keterlibatan kelembagaan adat lokal; • Belum tersedianya dokumen, sehingga pengawasan tidak maksimal 	Belum maksimalnya penerapan sanksi hukuman bagi pelanggar IUU
11	Sarana dan prasarana laboratorium belum optimal.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum dilakukan pengujian secara rutinitas penggunaan bahan-bahan berbahaya pada produk hasil perikanan; 	Belum optimalnya perencanaan dan pendanaan sarana dan prasarana serta infrastruktur pada Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
12	Sumber daya Manusia pada laboratorium belum memadai;	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Optimalnya pengawasan dan pengujian Mutu terhadap hasil perikanan; • Belum banyaknya parameter kajian dan analisa pada Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan 	Kesesuaian kualifikasi sumberdaya manusia pada Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih pada periode tahun 2017-2022 yaitu **“TERWUJUDNYA ACEH YANG DAMAI DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, ADIL DAN MELAYANI”**. Visi ini mengandung tiga kata kunci sebagai berikut: (1) Aceh yang **damai** bermakna perdamaian berlangsung secara berkelanjutan dengan memmanifestasikan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan; (2) Aceh yang **sejahtera** bermakna rakyat Aceh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak; (3) Pemerintahan yang **bersih, adil dan melayani** bermakna tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata.

Visi di atas akan tercapai dengan ditempuh melalui 10 (Sepuluh) misi utama yaitu :

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan melayani;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dan budaya ke-Acehan;
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat regional, nasional dan internasional;
5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial secara terintegrasi dan berkualitas;
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan;
7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan;
8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan;
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Program kerja yang dapat mengayomi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Aceh perlu direncanakan demi terciptanya suasana Aceh yang kondusif. Program unggulan yang akan dilaksanakan oleh pemimpin daerah terpilih pada periode 2017-2022 yaitu :

1. Aceh Seujahtra (JKA Plus)
2. Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
3. Aceh Carông
4. Aceh Energi
5. Aceh Meugoë dan Meulaôt
6. Acèh Troë
7. Acèh Kreatif
8. Acèh Kaya
9. Acèh Peumulia
13. Acèh Green
10. Acèh Damê
11. Acèh Meuadab
12. Acèh Teuga
13. Acèh Green
14. Acèh Seuninya
15. Acèh Seumeugot

Berdasarkan visi, misi dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, maka kontribusi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh dalam mensukseskan visi dan misi Pemerintahan Aceh tertera dalam semua program unggulan yang ada. Dalam menjalankan program kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh terfokus pada program unggulan Pemerintah Aceh yaitu Aceh Meugo dan Meulaot, Aceh Peumulia, Aceh Green, dan Aceh SIAT. Adapun perwujudan kontribusi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam mengelola sektor Kelautan dan Perikanan Aceh dapat dijabarkan dalam tujuan, sasaran tujuan, dan program yang berhubungan dengan Program Unggulan yang ada sebagai berikut :

A. Tujuan Aceh Meugo dan Meulaot :

1. Pembangunan pertanian dan ekonomi maritim melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi;
2. Penuntasan penyediaan irigasi yang dapat mengalir seluruh lahan pertanian rakyat dan pencetakan sawah baru;
3. Modernisasi teknologi bagi sektor pertanian termasuk teknologi pengolahan pasca panen;
4. Memperbaiki fasilitas dan teknologi perikanan serta jaringan pemasarannya;

5. Kemandirian rantai pasok (supply chain) di berbagai tingkatan dalam sektor peternakan rakyat;
6. Penyediaan sarana pendukung bagi nilai tambah dan akses pasar yang lebih luas terhadap produk pertanian, peternakan dan perikanan.

Sasaran Tujuan Aceh Meugo dan Meulaot yang terkait dengan bidang Kelautan dan Perikanan:

1. Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan Aceh;
2. Menurunnya jumlah daerah rawan pangan Aceh;
3. Meningkatnya eksplorasi sumber daya alam pada bidang Kelautan dan Perikanan secara lestari dan berkelanjutan;
4. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pada bidang Kelautan dan Perikanan.
5. Meningkatnya produk unggulan kelautan dan perikanan lokal yang kreatif, inovatif, serta memiliki nilai kekhasan daerah.

Program Dinas Kelautan dan Perikanan yang menunjang tujuan Aceh Meugo dan Meulaot:

1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
3. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
4. Program Pengembangan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
9. Program Pembangunan Perencanaan Ekonomi;
10. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan
11. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

B. Tujuan Aceh Peumulia :

1. Pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan liar (pungli);
2. Pengembangan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur berbasis e- kinerja;

3. Penetapan limit waktu pelayanan aparatur untuk setiap jenis dan fungsi layanan
4. Penempatan pimpinan SKPA yang berkualitas melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Sasaran Tujuan Aceh Peumulia yang terkait dengan bidang Kelautan dan Perikanan:

1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana kelembagaan dinas, pengelolaan sumberdaya manusia, dan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan.
2. Meningkatnya kinerja dan layanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Program Dinas Kelautan dan Perikanan yang menunjang tujuan Aceh Peumulia:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Pembangunan Perencanaan Ekonomi;

C. Tujuan Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu):

1. Pengembangan sistem informasi dan database Aceh yang terpadu yang akan digunakan untuk semua sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat.
2. Informasi yang berguna untuk pembangunan dan pelayanan akan terupdate dengan cepat, dapat diakses oleh semua stakeholder melalui satu pintu, serta menjadi acuan bersama dalam perencanaan pembangunan pada setiap tingkat pemerintahan.

Sasaran Tujuan Aceh SIAT yang terkait dengan bidang Kelautan dan Perikanan :

1. Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip *Evidence Based Planning*.
2. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan lintas sektor dan wilayah.

Program Dinas Kelautan dan Perikanan yang menunjang tujuan Aceh SIAT :

1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

E. Tujuan Aceh Green :

Menegaskan kembali pembangunan aceh berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif terhadap resiko bencana alam;

1. Mendesain rencana pertumbuhan hijau Aceh (*Green growth plan*) sebagai bagian dari implementasi azas berkelanjutan dalam pembangunan Aceh;
2. Melakukan langkah-langkah strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
3. Menerapkan strategi mitigasi dan manajemen resiko bencana melalui penguatan kapasitas tim tanggap darurat dan penyadartahuan masyarakat;
4. Membangun rencana pemulihan spesies kunci yang kritis terancam punah;
5. Membangun manufaktur bagi penyediaan kayu alternatif (*wood polymer composite*) dalam rangka mengantisipasi lonjakan kebutuhan kayu dunia untuk pencegahan degradasi hutan.

Sasaran Tujuan Aceh Green yang terkait dengan bidang Kelautan dan Perikanan:

1. Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir
2. Meningkatkan rehabilitasi vegetasi pantai dan vegetasi mangrove di kawasan pesisir.

Program Dinas Kelautan dan Perikanan yang menunjang tujuan Aceh Green :

1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
2. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.3.1 Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode tahun 2019. Visi KKP selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritime dunia. Visi KKP 2015 – 2019 yaitu:

“Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional.”

Visi KKP mengandung 4 kunci penting yaitu **Mandiri** dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. **Maju** dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. **Kuat** diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari.

Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

3.3.2 Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Misi merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi yang dimaksud. Terdapat 3 (tiga) pilar yang menjadi misi KKP yaitu:

1. Kedaulatan (*Sovereignty*) yaitu mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Keberlanjutan (*Sustainability*) yaitu mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
3. Kesejahteraan (*Prosperity*) yaitu mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

Kepentingan nasional yang dimandatkan kepada KKP utamanya adalah terkait dengan pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, yang akan berdampak pada aspek produksi, nilai tambah dan daya saing, pemasaran serta konservasi dengan didukung oleh SDM kompeten dan IPTEK yang inovatif. Hal tersebut mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

3.3.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Kabinet Kerja, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut;
4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya;
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat;
7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

3.3.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 sebagai penjabaran Visi dan Misi pembangunan nasional dan Visi Misi KKP, ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang ditetapkan. Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome/ impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, KKP menjabarkan 3 misi yakni **“Kedaulatan”**, **“Keberlanjutan”**, dan **“Kesejahteraan”** dan menggunakan pendekatan metoda *Balanced Scorecard (BSC)* yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders prespective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih pada periode tahun 2017-2022 yaitu *Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani”*. Pencapaian visi ini dapat diraih dengan beberapa program unggulan *Aceh Hebat* seperti Aceh Meugo dan Aceh Green. Program unggulan tersebut menegaskan kembali komitmen pembangunan Aceh ke arah berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, berorientasi pada pertumbuhan hijau, mengupayakan langkah-langkah strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, menerapkan strategi mitigasi dan manajemen risiko bencana melalui penguatan kapasitas SDM dan masyarakat, serta mengupayakan pemulihan spesies ikan yang kritis terancam punah

(perlindungan keanekaragaman hayati). Salah satu upaya untuk perlindungan Lingkungan Hidup (LH) dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan (PB) dan mewujudkan visi tersebut di atas, adalah penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment (SEA)* dalam rangka mendukung rencana pembangunan ekonomi jangka menengah di Aceh. KLHS adalah instrumen pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan Lingkungan Hidup dan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan.

Manfaat berkelanjutan dapat tercapai jika pemanfaatan tidak melebihi kapasitas daya dukung dari sumberdaya. Beberapa potensi sumberdaya alam perikanan dan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Aceh belum termanfaatkan secara optimal. Salah satu tantangan dalam pengelolaan sumberdaya alam adalah membangun kesejahteraan dari sumberdaya alam yang semakin menipis dengan jumlah manusia yang terus bertambah sehingga kontrol atas sumberdaya-sumberdaya tersebut melalui pengelolaan berkelanjutan perlu didasarkan pada *resources based* dengan mendorong penerapan *harvest control rules* (batasan aturan pemanfaatannya), hal ini dapat di terapkan dengan adanya rencana tata ruang wilayah.

Rencana pola tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Aceh merupakan rencana distribusi peruntukan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi konservasi, fungsi kawasan strategis nasional tertentu, fungsi pemanfaatan umum dan fungsi alur laut. Dengan demikian rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi berfungsi:

1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi;
2. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional;
3. Sebagai alokasi ruang untuk kepentingan perlindungan cadangan sumber daya ikan;
4. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang darat – laut dan di ruang pesisir itu sendiri;
5. Sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi.

Rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi dirumuskan berdasarkan:

1. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi;
2. Kesesuaian dan Keterkaitan antar kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Daya dukung dan daya tampung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh maka terdapat beberapa perencanaan kawasan yaitu:

3.4.1. Rencana Kawasan Konservasi

1. Pemanfaatan Kawasan Konservasi

- Pelaksanaan P3D Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Aceh;
- Pembentukan Unit Pengelola Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Aceh;
- Evaluasi Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Aceh Besar dan wilayah pesisir Timur Aceh, Kabupaten: Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang;
- Pencadangan KKPD (Tamiang, Aceh Barat, Nagan raya, Abdya, Aceh Selatan) Tamiang, Aceh Barat, Nagan raya, Abdya, Aceh Selatan;
- Evaluasi kawasan lindung pada perairan Propinsi Aceh yang tertuang dalam RTRW Aceh di Provinsi Aceh;
- Penetapan Kawasan Konservasi Perairan (PISISI (Simelue), Aceh Jaya, Aceh Besar) di Simelue, Aceh Jaya, Aceh Besar;
- Penetapan Kawasan Konservasi Perairan (Tamiang, Aceh Barat, Nagan raya, Abdya, Aceh Selatan) di Tamiang, Aceh Barat, Nagan raya, Abdya, Aceh Selatan;
- Sosialisasi penetapan kawasan konservasi perairan kepada masyarakat di Simelue, Aceh Jaya, Aceh Besar;
- Integrasi tata kelola kelembagaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau Kecil dengan kelembagaan adat di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau Kecil di Seluruh Kabupaten Pesisir;

- Pengembangan jejaring kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau Kecil di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Rehabilitasi ekosistem pesisir di Provinsi Aceh;
- Pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau Kecil di Seluruh Kabupaten Pesisir.

2. Perlindungan Daerah Rawan Abrasi, Banjir dan Tsunami

- Identifikasi pesisir rawan bencana (abrasi, banjir, gelombang dan tsunami) di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Pembangunan infrastruktur buatan pelindung pantai/alami untuk penanggulangan abrasi, banjir, dan tsunami di Pesisir rawan abrasi, banjir dan tsunami;
- Rehabilitasi pada kawasan rawan gelombang pasang, abrasi, banjir, dan tsunami di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Konservasi habitat (mangrove, terumbu karang, dan padang lamun) di Seluruh Kabupaten Pesisir.

3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat Dalam Menjaga Dan Melestarikan Lingkungan

- Penguatan kelembagaan pengelola sumberdaya alam berbasis Adat di Seluruh Kecamatan Pesisir;
- Peningkatan operasional pengawasan sumber daya perikanan di Seluruh Kecamatan Pesisir;
- Integrasi pengawasan (integrasi POKMASWAS dengan Panglima Laot) di Seluruh Kecamatan Pesisir;
- Integrasi tata kelola sumberdaya perikanan berbasis Lhok (panglima laot) dengan tata kelola kawasan konservasi di Seluruh Kecamatan Pesisir;
- Penguatan peran panglima laot dalam penyelesaian konflik perikanan, pengawasan dan pendataan dalam pengelolaan perikanan dan konservasi (pelatihan) di Seluruh Kecamatan Pesisir.

3.4.2 Rencana Pemanfaatan Kawasan Pemanfaatan Umum

1. Pemanfaatan Zona Pariwisata

- Peninjauan kembali rencana induk pariwisata khususnya wisata bahari yang berlokasi di Seluruh Kabupaten Pesisir;

- Peningkatan sarana prasarana wisata di kawasan destinasi wisata pesisir, dan PPK;
- Promosi wisata bahari pada tingkat nasional dan internasional di kawasan destinasi wisata pesisir, dan PPK;
- Pengembangan destinasi dan atraksi pariwisata bahari di kawasan destinasi wisata pesisir, dan PPK;
- Identifikasi kondisi sarana prasarana dermaga daerah tujuan wisata di kawasan destinasi wisata pesisir, dan PPK;
- Perencanaan kawasan wisata bahari terpadu di kawasan destinasi wisata pesisir, dan PPK;
- Pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan daya tarik wisata dan pengembangan usaha pariwisata di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Pelatihan dan pendampingan masyarakat lokal sebagai pelaku bisnis pariwisata bahari di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Pengendalian dampak negatif kegiatan pariwisata di wilayah pesisir di Seluruh Kabupaten Pesisir.

2. Pemanfaatan Zona Pemukiman

- Peningkatan sarana prasarana permukiman pesisir di Kecamatan Pesisir;
- Penataan ruang pusat-pusat pelayanan pesisir (RDTR, RTBL) amanah UU No.26 Tahun 2007 di Kecamatan Pesisir;
- Sistem pengolahan limbah berbasis masyarakat dan terintegrasi di Kecamatan Pesisir;
- Pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pesisir di Kecamatan Pesisir.

3. Pemanfaatan Zona Pelabuhan

- Identifikasi kondisi sarana pelabuhan di Kecamatan Pesisir;
- Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan di Kecamatan Pesisir;
- Penataan ruang kawasan sekitar pelabuhan perikanan di Kecamatan Pesisir;
- Peningkatan pelayanan kepelabuhanan di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Revitalisasi sarana prasarana pelabuhan di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Peningkatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan di Seluruh Kabupaten Pesisir;

- Pengendalian dan pelaksanaan pengawasan kegiatan kepelabuhanan di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Pembuatan dan pengesahan dokumen WKOPP (untuk pelabuhan perikanan yang belum menyusun) di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Pembuatan dan pengesahan dokumen DLKr dan DLKp (untuk pelabuhan umum yang belum menyusun) di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Pengembangan sistem pemantauan pelabuhan Aceh di Seluruh Kabupaten Pesisir.

4. Hutan Mangrove

- Sosialisasi nilai penting ekologi, ekonomi dan fisik dari kawasan hutan mangrove kepada masyarakat di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Integrasi tata kelola kelembagaan kawasan hutan mangrove dengan kelembagaan adat di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Perencanaan pengelolaan mangrove di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Rehabilitasi ekosistem mangrove di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan mangrove di Seluruh Kabupaten Pesisir.

5. Pemanfaatan Zona Perikanan Tangkap

- Sosialisasi aturan penangkapan ikan (alat tangkap dan jalur penangkapan ikan) di Seluruh Kecamatan Pesisir;
- Pengembangan skala perikanan tangkap di Seluruh Kecamatan Pesisir;
- Pembangunan sistem informasi daerah penangkapan ikan di Seluruh Kecamatan Pesisir;
- Pedampingan kelompok nelayan perikanan tangkap di Seluruh Kecamatan Pesisir;
- Pembangunan tempat pelelangan ikan di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Pemeliharaan berkala tempat pelelangan ikan di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Pendaftaran dan pendataan kapal nelayan di Seluruh Kecamatan Pesisir;
- Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Peningkatkan fungsi pelabuhan perikanan samudera di Kota Banda Aceh.

- Penerapan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga kualitas hasil tangkapan di Sentra Perikanan Tangkap;
- Penataan alur dan tata niaga hasil tangkapan perikanan di Sentra Perikanan Tangkap;
- Pembinaan, monitoring dan evaluasi perijinan perikanan di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Pelatihan pengolahan pasca panen yang berorientasi ekspor di Sentra Perikanan Tangkap;
- Peningkatan pengawasan mutu dan keragaman produksi hasil perikanan di Sentra Perikanan Tangkap;
- Pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di Sentra Perikanan Tangkap;
- Sosialisasi pelaporan hasil tangkapan sesuai standar di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Pembangunan jejaring kemitraan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Seluruh Kabupaten Pesisir.

6. Pemanfaatan Zona Perikanan Budidaya

- Penataan dan Pengembangan perikanan budidaya berbasis klaster di Sentra Budidaya;
- Pengembangan bibit unggul di Sentra Budidaya;
- Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan di Sentra Budidaya;
- Pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya di Sentra Budidaya;
- Peningkatan Balai Benih Ikan (BBI) di BBI;
- Peningkatan keterampilan pembudidaya di Sentra Budidaya;
- Peningkatkan pendampingan dan penerapan teknologi terapan adaptif perikanan budidaya di Sentra Budidaya;
- Peningkatkan produksi perikanan budidaya di Sentra Budidaya;
- Pengembangan budidaya laut di Sentra Budidaya;
- Pengembangan pakan untuk budidaya perikanan di Sentra Budidaya.
- Peningkatan sarana prasarana budidaya perikanan di Sentra Budidaya.
- Peningkatan kapasitas SDM di bidang budidaya laut di Seluruh Kabupaten Pesisir;
- Monitoring secara berkala lingkungan budidaya laut di Sentra budidaya laut;
- Perluasan pasar hasil budidaya laut di dalam dan luar negeri di Seluruh Kabupaten Pesisir.

7. Pemanfaatan Zona Pertambangan

- Peningkatan kualitas SDM di bidang industri dan pertambangan di Kabupaten Pesisir;
- Peningkatan kesadaran sektor industri dan pertambangan dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Pesisir.

8. Pemanfaatan Zona wilayah Adat

- Membangun mekanisme pemantauan dan pengawasan pemanfaatan zona wilayah adat di seluruh Kecamatan Pesisir;
- Pelatihan dan pendampingan Panglima Laot dalam pemantauan dan pengawasan pemanfaatan zona wilayah adat di seluruh Kecamatan Pesisir;
- Penguatan kelembagaan pengelola sumberdaya alam berbasis Adat di seluruh Kecamatan Pesisir;
- Peningkatan operasional pengawasan sumber daya perikanan di seluruh Kecamatan Pesisir;
- Integrasi pengawasan (integrasi POKMASWAS dengan Panglima Laot) di seluruh Kecamatan Pesisir;
- Integrasi tata kelola sumberdaya perikanan berbasis Lhok (panglima laot) dengan tata kelola kawasan konservasi di seluruh Kecamatan Pesisir;
- Penguatan peran panglima laot dalam penyelesaian konflik perikanan, pengawasan dan pendataan dalam pengelolaan perikanan dan konservasi (pelatihan) di seluruh Kecamatan Pesisir.

3.4.3 Rencana Pemanfaatan Alur Laut

1. Alur Pelayanan

- Penetapan sistem alur pelayanan di seluruh Kabupaten Pesisir;
- Penetapan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya di seluruh Kabupaten Pesisir;
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian alur pelayanan di seluruh Kabupaten Pesisir;

- Peningkatan keselamatan, keamanan dan kenyamanan pelayaran di seluruh Kabupaten Pesisir;
- Pemasangan tanda batas dan rambu pelayaran di seluruh Kabupaten Pesisir;
- Pengembangan jalur dan armada pelayaran di seluruh Kabupaten Pesisir;
- Peningkatan pemeliharaan rutin dan atau berkala alur pelayaran di seluruh Kabupaten Pesisir;
- Sosialisasi dan pengendalian dampak pencemaran akibat limbah kapal di seluruh Kabupaten Pesisir.

2. Alur Migrasi Biota Laut

- Identifikasi alur biota (pola migrasi, tingkah laku, jenis-jenis biota laut migrasi);
- Pelibatan dan peningkatan pemahaman seluruh lapisan masyarakat terhadap berbagai karakteristik biota migrasi;
- Pengembangan sistem monitoring alur migrasi biota migrasi;
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam monitoring alur migrasi biota;
- Intergrasi alur biota migrasi dengan aktivitas pelayaran, perikanan, pariwisata, dan pemanfaatan ruang laut lainnya.

Instrumen pengurangan kecepatan kapal dalam jalur migrasi biota laut melalui radio pelayaran, maklumat pelayaran dan berita pelaut.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan bagian penting dan perlu dikaji karena sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan prioritas pembangunan dan program unggulan sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi penting yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di

masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dditangani;
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan kriteria yang tersebut diatas dan setelah dilakukan kajian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pembangunan dan pengembangan untuk mewujudkan Aceh yang sejahtera pada sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Aceh tertera pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2 Penentuan Isu-isu Strategis

No.	BIDANG	ISU STRATEGIS
1	Bidang Kesekretariatan	Kelayakan sarana dan prasarana lembaga
		Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
		Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola dan pelayanan publik
		Kajian pembangunan kelautan dan perikanan
2	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Peraturan Gubernur tentang pengelolaan dan penataan pesisir dan pulau pulau kecil belum tersedia
		Penanaman kembali vegetasi pantai dan pesisir
		Perlindungan ikan yang hampir punah (cites)
		Penentuan Kawasan konservasi dan zona pemanfaatan umum
		Penguatan sumber daya manusia pesisir

No.	BIDANG	ISU STRATEGIS
3	Bidang Perikanan Tangkap	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan
		Modernisasi armada tangkap dan alat tangkap yang ramah lingkungan
		Peningkatan fasilitas pokok dan penunjang pelabuhan perikanan sangat dibutuhkan
		Kurangnya ketersediaan data sumber daya ikan
		Perlunya penataan kelembagaan pengelolaan pelabuhan perikanan
4	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengembangan kawasan komoditas unggulan berbasis mukim dan lhok
		Produksi dan produktivitas perikanan budidaya
		Akses modal usaha yang masih rendah
		Pembinaan dan penerapan CBIB, CPIB, pakan mandiri dan standar kelayakan produksi (SKP) budidaya belum optimal
		Terbangunnya regulasi distribusi dan sistem logistik
		Pengembangan kawasan budidaya laut
		Penataan, penguatan dan pengembangan kapasitas pembudidaya dan unit-unit pembenihan serta pelabuhan perikanan
5	Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan	Peningkatan penegakan hukum, dan pengawasan di bidang kelautan dan perikanan
		Persiapan dokumen pengawasan kawasan kelautan dan perikanan
6	UPTD Laboratorium Pembinaan Dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)	Pemenuhan jaminan mutu dan keamanan pangan produk hasil perikanan
		Peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana laboratorium

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

Tujuan merupakan target yang ingin dicapai dan dibatasi oleh ruang waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan tersebut harus merefleksikan bagaimana visi dan misi pemerintah Aceh yang terkait dengan tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dapat terealisasi dengan baik. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut harus diterjemahkan kedalam bentuk sasaran yang terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Terdapatnya beberapa misi Gubernur Aceh yang terkait dengan tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yaitu:

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan melayani;
2. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan;
3. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Dalam mendukung visi dan misi Gubernur Aceh yang telah ditentukan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh telah merumuskan beberapa rumusan tujuan dan sasaran agar dapat mewujudkan misi yang telah tercantum dalam RPJMA 2017-2022. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan DKP Aceh untuk 5 (lima) tahun disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DKP Aceh

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan petani dan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	98.5	99.75	101.25	103	106
			Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)	98,00	98,50	99,50	101	103

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
			Nilai Ekspor Perikanan (USD)	1.142.899,8	1.250.000	1.357.000	1.475.000	1.552.000
			Kelompok pengolahan ikan (Kelompok)	20	25	27	30	35
		Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	51,92	53,60	55,28	56,96	58,64
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh melalui Sektor Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan pembangunan sektor perikanan	Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan (%)	4,85	4,87	4,94	4,96	4,98
			Produksi Perikanan Tangkap (ton)	197,132	205,741	214,350	222,959	231,568
			Produksi Perikanan Budidaya (ton)	97,833	108,045	118,258	128,470	138,682
			Produksi Garam (ton)	15.113,80	19.647,94	25.542,32	33.205,02	43.166,52
3	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP (%)	63,00	65,50	70,50	77,00	85,00

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
4	Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence Based Planning	Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan lintas sektor dan wilayah	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan (%)	100	100	100	100	100
5	Meningkatkan tatakelola lingkungan Hidup lestari	Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir	Luas kawasan konservasi perairan (ha)	145.237,77	212.618,89	280.000,00	280.500,00	281.100,00
			Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	69.67	73.34	77.01	80.67	84.34
			Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	2.57	3.76	4.95	4.96	4.97

Tujuan jangka menengah pelayanan DKP Aceh yang telah dirumuskan yaitu :

1. Menurunnya angka kemiskinan;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh melalui sektor kelautan dan perikanan;
3. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas;

4. Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip *Evidence Based Planning*;
5. Meningkatkan tatakelola lingkungan hidup lestari.

Berdasarkan tujuan tersebut dapat dirumuskan sasaran yang menjadi salah satu dasar dalam melakukan penilaian dan pemantauan kinerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan sehingga menjadi alat pemicu terhadap sesuatu yang harus dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang harus dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Sejalan dengan hal tersebut, sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mengacu kepada sasaran jangka menengah yang telah dirumuskan dalam RPJMA 2017 – 2022. Adapun sasaran yang terkait dengan tupoksi DKP Aceh dalam RPJMA yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan;
2. Meningkatkan pembangunan sektor perikanan;
3. Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan;
4. Birokrasi yang efektif dan efisien;
5. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan lintas sektor dan wilayah;
6. Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir.

Mengacu pada sasaran jangka menengah yang telah dirumuskan dalam RPJMA 2017 – 2022, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh menentukan beberapa sasaran dan indikator sasaran yang menjadi dasar penilaian dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Sasaran jangka menengah pelayanan DKP Aceh yaitu sebagai berikut:

1. Terciptanya kondisi masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dapat terukur dari capaian nilai tukar nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi).
 - Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 98,50 pada tahun 2018 dan pada tahun 2022 menjadi 106;
 - Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) pada tahun 2018 sebesar 98 menjadi 103 pada tahun 2022.
2. Kuantitas produksi perikanan tangkap dan budidaya yang terukur dari nilai volume produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2018 sebesar 197,132 menjadi 231,568 ton pada tahun 2022. Sedangkan produksi perikanan budidaya tahun 2018 sebesar 97,833 ton menjadi 138,682 ton pada tahun 2022.

3. Tingkat kegemaran masyarakat Aceh dalam konsumsi ikan yang terukur dari nilai konsumsi ikan pada tahun 2018 sebesar 51,92 kg/kap/tahun menjadi 58,64 kg/kap/tahun pada tahun 2022.
4. Peningkatan kontribusi subsektor perikanan yang menjadi tolak ukur adalah nilai Persentase kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB sebesar 4,85 % pada tahun 2018 menjadi 4,98 % pada tahun 2022.
5. Terwujudnya reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel dapat diukur dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditargetkan sebesar 63,00% pada tahun 2018 dan pada tahun 2022 menjadi 85,00%.
6. Luasan Kawasan konservasi sebesar 145.237,77 ha pada tahun 2018 menjadi 281.100,00 ha pada tahun 2022
7. Peningkatan ekspor hasil perikanan dapat diukur dari nilai ekspor hasil perikanan. Nilai ekspor hasil perikanan Aceh pada tahun 2018 sebesar USD 1.142.899.8 dan pada tahun 2022 menjadi USD 1.552.000.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh tahun 2017 - 2022 dilakukan dengan mendukung visi, misi dan arah kebijakan Gubernur Aceh dengan serangkaian rencana tindakan yang diimplementasikan untuk mencapai kondisi yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan dengan memperhatikan kondisi sumber daya kelautan dan perikanan saat ini. Dalam proses perencanaan dilakukan dengan menganalisis faktor internal dan eksternal berdasarkan isu dan permasalahan prioritas atau utama yang dihadapi Pemerintah Aceh (Sektor Kelautan dan Perikanan), oleh karena itu dapat ditentukan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan strategis pada tiap bidang pemerintahan disertai dengan tolak ukurnya. Secara struktur Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dijabarkan secara spesifik dan jelas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DKP pada lingkup pemerintah Aceh.

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi dan Misi pemerintah Aceh yang telah dirumuskan dapat menjadi tolak ukur dalam upaya mempertegas tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, dan untuk mencapai tujuan dan sasaran lima tahun kedepan maka diperlukan perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah sistematis yang berisikan program-program unggulan untuk mewujudkan visi dan misi, strategi juga dapat dijadikan sarana dalam melakukan transformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan. Terdapat 10 (sepuluh) misi pemerintah Aceh yang telah dirumuskan, dan 4 (empat) diantaranya selaras dengan program-program unggulan yang telah dirangkum oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam arah kebijakan. Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.

VISI : TERWUJUDNYA ACEH YANG DAMAI DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, ADIL DAN MELAYANI			
MISI 1 : Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kelayakan sarana dan prasarana lembaga2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia3. Melakukan pembenahan kualitas birokrasi, tata kelola dan pelayanan publik4. Melakukan kajian pembangunan kelautan dan perikanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan Administrasi perkantoran2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3. Peningkatan disiplin aparatur4. Peningkatan kapasitas sumberdaya apatur

MISI 6 : Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya Angka Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kesejahteraan petani dan Nelayan2. Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan	<ol style="list-style-type: none">1. Modernisasi terhadap armada tangkap dan alat tangkap yang ramah lingkungan2. Mempermudah akses modal3. Melakukan pembinaan untuk CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik), CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik), CPIB (Cara Penanganan Ikan Yang Baik), pakan mandiri, dan SKP (Standar Kelayakan Produksi) budidaya4. Peningkatan kecakapan kepelautan5. Mendesain regulasi dan sistem logistik yang baik6. Pengembangan kawasan budidaya7. Melaksanakan penguatan kapasitas pembudidaya, nelayan dan pengolah ikan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Perikanan Tangkap2. Pengembangan Budidaya Perikanan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh melalui Sektor Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan pembangunan sektor perikanan	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan penjaminan mutu dan kualitas produk perikanan2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana laboratorium	<ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan2. Peningkatan nilai tambah produksi perikanan

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Melakukan pengembangan kawasan unggulan berbasis mukim dan Lhok 4. Mempermudah akses modal 5. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya ikan 	3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Misi 9 : Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip <i>evidence based planning</i> yang efektif, efisien dan berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip <i>Evidence Based Planning</i>	Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan lintas sektor dan wilayah	Peningkatan kualitas perencanaan berbasis bukti	Pembangunan perencanaan Ekonomi
MISI 10 : Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tatakelola lingkungan Hidup lestari	Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan terhadap penegakan hukum, dan pengawasan di bidang kelautan dan perikanan 2. Penyediaan Dokumen pengawasan kawasan kelautan dan perikanan 3. Peningkatan kualitas kawasan konservasi laut dan pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 2. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Tujuan dan sasaran dicapai dengan merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun dari tahun 2017 sampai dengan 2022. Adapun Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 1. Kegiatan motorisasi armada perikanan dalam upaya daya jelajah dan produktivitas nelayan;
 2. Kegiatan pembangunan pangkalan pendaratan ikan;
 3. Kegiatan pengadaan alat bantu penangkapan ikan;
 4. Kegiatan pengembangan pelabuhan perikanan.

- b. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
 1. Kegiatan pengembangan bibit ikan unggul;
 2. Kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan;
 3. Kegiatan revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air tawar;
 4. Kegiatan revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air payau;
 5. Kegiatan pengembangan perbenihan perikanan.

- c. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Program peningkatan nilai tambah produksi perikanan
 1. Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan, pusat jaringan usaha dan investasi (PUSJUI) serta peningkatan upaya pemasaran hasil perikanan dan kelautan;
 2. Kegiatan pengembangan laboratorium pengujian mutu perikanan.

- d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat;
 2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 3. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 4. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
 5. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor;

6. Kegiatan penyediaan alat tulis Kantor;
 7. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 8. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 9. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 10. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 11. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman;
 12. Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 13. Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan pembangunan gedung kantor;
 2. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- f. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- g. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis.
- h. Program Pembangunan Perencanaan Ekonomi
1. Kegiatan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan.
- i. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan
- Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
1. Kegiatan pengawasan dan penertiban ilegal fishing;
 2. Kegiatan Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumber daya kelautan;
 3. Kegiatan Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan.
- j. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan pulau-pulau kecil
1. Kegiatan pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir.

Kebutuhan pendanaan pembangunan untuk periode 2017-2022, Dinas Kelautan dan perikanan Aceh dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut.

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(T1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh melalui Sektor Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan		(P1) Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (ton)	184.190,80	197.132,00	207.788.000.000	205.741,00	167.729.950.000	214.350,00	187.805.700.000	222.959,00	203.175.000.000	231.568,00	236.847.400.000	231.568,00	1.003.346.050.000	Bidang perikanan tangkap	Provinsi Aceh
			Kegiatan motorisasi armada perikanan dalam upaya daya jelajah dan produktivitas nelayan	Jumlah kapal perikanan ≤ 5 GT yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap, dan laik simpan (unit; Kumulatif)	5.862,00	5.912,00	10.000.000.000	5.947,00	7.000.000.000	6.042,00	19.000.000.000	6247	41.000.000.000	6532	57.000.000.000	6532	134.000.000.000	Bidang perikanan tangkap	18 Kabupaten/Kota
				Jumlah bagan apung (unit; Kumulatif)	0	5	2.250.000.000	8	1.350.000.000	16	3.600.000.000	36	9.000.000.000	61	11.250.000.000	61	27.450.000.000	Bidang perikanan tangkap	18 Kabupaten/Kota
				Jumlah kelompok usaha nelayan yang dibina (kelompok; Kumulatif)	0	50	250.000.000	100	250.000.000	150	250.000.000	250	600.000.000	300	750.000.000	300	2.100.000.000	Bidang perikanan tangkap	18 Kabupaten/Kota
				Jumlah diversifikasi usaha keluarga nelayan Perikanan/RTP (Kumulatif)	0	10	500.000.000	15	250.000.000	20	250.000.000	35	500.000.000	45	500.000.000	45	2.000.000.000	Bidang perikanan tangkap	18 Kabupaten/Kota
			Kegiatan pembangunan pangkalan pendaratan ikan	Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk (lokasi; Kumulatif)	1	6	150.000.000.000	10	120.000.000.000	14	120.000.000.000	16	90.000.000.000	19	120.000.000.000	19	600.000.000.000	Bidang perikanan tangkap	17 Kabupaten/Kota
				Penyusunan Master Plan dan Detail Engineering Design (Dokumen; Kumulatif)	9	11	10.000.000.000	13	10.000.000.000	15	10.000.000.000	17	13.000.000.000	0	0	17	43.000.000.000	Bidang perikanan tangkap	17 Kabupaten/Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Penyusunan Amdal (Dokumen; Kumulatif)	0	5	10.000.000.000	9	8.000.000.000	13	10.000.000.000	17	14.000.000.000	0	0	17	42.000.000.000	Bidang perikanan tangkap	17 Kabupaten/Kota
				Jumlah UPT Pelabuhan Perikanan yang dibentuk dan ditetapkan kelasnya (lokasi; non Kumulatif)	2	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	4	2.800.000.000	5	3.500.000.000	17	9.300.000.000	Bidang perikanan tangkap	17 Kabupaten/Kota
			Kegiatan pengadaan alat bantu penangkapan ikan	Jumlah pengadaan mesin perahu kurang dari 15gt (unit; Kumulatif)	0	165	8.250.000.000	310	7.250.000.000	455	7.250.000.000	655	10.000.000.000	905	12.500.000.000	905	45.250.000.000	Bidang perikanan tangkap	18 Kabupaten/Kota
				Jumlah pengadaan rumpun laut dalam (unit; Kumulatif)	0	20	2.000.000.000	40	2.000.000.000	60	2.500.000.000	85	3.125.000.000	115	3.750.000.000	115	13.375.000.000	Bidang perikanan tangkap	18 Kabupaten/Kota
				Jumlah pengadaan GPS (unit; Kumulatif)	0	150	900.000.000	300	900.000.000	450	900.000.000	650	1.500.000.000	900	1.875.000.000	900	6.075.000.000	Bidang perikanan tangkap	18 Kabupaten/Kota
				Jumlah pengadaan fish finder (unit; Kumulatif)	0	150	1.402.500.000	257	1.000.450.000	399	1.327.700.000	599	2.000.000.000	900	3.010.000.000	900	8.740.650.000	Bidang perikanan tangkap	18 Kabupaten/Kota
				Jumlah pengadaan cool box (unit; Kumulatif)	0	257	385.500.000	510	379.500.000	762	378.000.000	1062	450.000.000	1476	662.400.000	1476	2.255.400.000	Bidang perikanan tangkap	18 Kabupaten/Kota
				Jumlah alat tangkap ramah lingkungan (unit; Kumulatif)	0	100	3.000.000.000	200	3.000.000.000	300	3.000.000.000	450	4.500.000.000	650	6.000.000.000	650	19.500.000.000	Bidang perikanan tangkap	18 Kabupaten/Kota
				Jumlah pengadaan lampu celup dalam air (unit; Kumulatif)	0	100	350.000.000	200	350.000.000	300	350.000.000	500	700.000.000	800	1.050.000.000	800	2.800.000.000	Bidang perikanan tangkap	18 Kabupaten/Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kegiatan pengembangan pelabuhan perikanan	Jumlah pengembangan pelabuhan UPT Daerah (lokasi)	2	2	7.500.000.000	2	5.000.000.000	2	8.000.000.000	2	10.000.000.000	2	15.000.000.000	2	45.500.000.000	Bidang perikanan tangkap	Banda Aceh dan Idi
	Meningkatkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan		(P2) Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (ton)	82.692,10	97.833,00	116.787.000.000	108.045	112.819.500.000	118.258,00	124.852.250.000	128.470,00	134.002.250.000	138.682,00	156.763.250.000	138.682,00	645.224.250.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Provinsi Aceh
			Kegiatan pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang menghasilkan benih unggul (unit;kumulatif)	30	34	1.600.000.000	44	4.000.000.000	54	4.000.000.000	64	4.000.000.000	80	6.400.000.000	80	20.000.000.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	23 Kabupaten/Kota
				Jumlah pembenihan bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) (unit; kumulatif)	3	8	1.500.000.000	13	1.500.000.000	18	1.500.000.000	20	680.000.000	23	1.065.000.000	23	6.245.000.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	23 Kabupaten/Kota
				Jumlah pelaku usaha pendederan (orang;kumulatif)	100	120	3.300.000.000	140	3.000.000.000	170	4.950.000.000	200	4.500.000.000	270	11.550.000.000	270	27.300.000.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	23 Kabupaten/Kota
			Kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan	Jumlah kelompok budidaya yang dibina dan difasilitasi (kelompok;kumulatif)	480	650	3.400.000.000	800	3.000.000.000	960	3.200.000.000	1060	2.000.000.000	1260	4.000.000.000	1260	15.600.000.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	23 Kabupaten/Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penganggung-jawab	Lokasi	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah percontohan teknologi anjuran (pilot project) (kegiatan; kumulatif)	5	10	2.500.000.000	15	2.500.000.000	20	2.500.000.000	25	2.500.000.000	30	2.500.000.000	30	12.500.000.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	30 klaster
			Kegiatan revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air tawar	Luas kawasan budidaya ikan air tawar yang direvitalisasi (Ha; kumulatif)	50	100	20.000.000.000	140	16.000.000.000	185	18.000.000.000	235	20.000.000.000	305	30.000.000.000	305	104.000.000.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	40 klaster
				Jumlah benih komoditas unggulan budidaya air tawar yang dibantu (juta ekor;kumulatif)	110	117	5.250.000.000	122	3.750.000.000	130	6.000.000.000	138	6.000.000.000	146	6.000.000.000	146	27.000.000.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	40 klaster
				Jumlah kelompok pembudidaya yang mendapatkan peralatan dan bahan baku pembuatan pakan mandiri (kelompok; kumulatif)	3	13	3.500.000.000	18	1.750.000.000	28	3.500.000.000	35	2.450.000.000	45	3.500.000.000	45	14.700.000.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	40 klaster
				Pakan Ikan air tawar (ton; non kumulatif)	120	225	4.050.000.000	178	2.136.000.000	200	2.400.000.000	200	2.400.000.000	175	2.100.000.000	175	13.086.000.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	40 klaster

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Kegiatan revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air payau	Luas kawasan budidaya ikan air payau yang direvitalisasi (Ha; kumulatif)	1000	2700	13.600.000.000	3700	10.000.000.000	5300	16.000.000.000	7000	17.000.000.000	8700	17.000.000.000	8700	73.600.000.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	84 klaster
				Panjang saluran tambak yang direhab (Km; Kumulatif)		30	80	3.750.000.000	110	2.250.000.000	155	3.375.000.000	196	3.000.000.000	253	4.275.000.000	253	16.650.000.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	84 klaster
				Jumlah perencanaan pembangunan (RIPJM, ID Tambak, DED, Kelembagaan) kawasan klaster komoditi unggulan perikanan budidaya berbasis mukim (dokumen; kumulatif)		9	149	7.000.000.000	221	3.600.000.000	311	4.500.000.000	386	3.750.000.000	0	0	386	18.850.000.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	84 klaster
				Jumlah benih komoditas unggulan budidaya air payau yang dibantu (juta ekor; kumulatif)		80	190	28.600.000.000	270	20.800.000.000	380	28.600.000.000	490	28.600.000.000	590	26.000.000.000	590	132.600.000.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	84 klaster
				Pakan ikan air payau (ton; non kumulatif)		150	200	3.200.000.000	200	3.400.000.000	300	5.100.000.000	500	8.500.000.000	600	10.200.000.000	600	30.400.000.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	84 klaster

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah kelompok pembudidaya yang mendapatkan peralatan dan bahan baku pembuatan pakan mandiri (kelompok; kumulatif)	0	1	2.000.000.000	2	2.000.000.000	4	4.000.000.000	6	4.000.000.000	9	6.000.000.000	9	18.000.000.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	84 klaster
				Jumlah KJA yang direvitalisasi (unit; Kumulatif)	8	16	8.000.000.000	25	9.000.000.000	35	10.000.000.000	49	14.000.000.000	64	15.000.000.000	64	56.000.000.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Sabang, Simeulu, Singkil, Aceh Besar
			Kegiatan pengembangan perbenihan perikanan	Pengembangan sarana dan prasarana UPT Daerah Balai Benih Air Tawar (unit; non kumulatif)	3	3	3.000.000.000	3	3.000.000.000	3	3.000.000.000	3	3.000.000.000	3	3.000.000.000	3	15.000.000.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bireuen, Aceh tengah dan Aceh tenggara
				Pengembangan sarana dan prasarana UPT Daerah Balai Benih Ikan pantai (unit; non kumulatif)	1	1	2.000.000.000	2	20.000.000.000	2	2.500.000.000	2	5.000.000.000	2	5.000.000.000	2	34.500.000.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	simeulu dan Aceh besar
				Produksi calon induk unggul air tawar (Ekor; kumulatif)	0	7900	237.000.000	26000	633.500.000	55350	1.027.250.000	101700	1.622.250.000	166650	2.273.250.000	166650	5.793.250.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bireuen, Aceh Tengah dan Aceh Tenggara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Produksi benih unggul (juta ekor; non kumulatif)	2	3	300.000.000	5	500.000.000	7	700.000.000	10	1.000.000.000	9	900.000.000	9	3.400.000.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bireuen, Aceh Tengah dan Aceh Tenggara
(T2) Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan petani dan Nelayan		(P3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya nilai ekspor perikanan (USD)	634.679	1.142.900	4.146.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Provinsi Aceh
				Meningkatnya jumlah masyarakat atau kelompok pengolah ikan (Kelompok)	25	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	23 Kabupaten / kota
	Meningkatkan kesejahteraan petani dan Nelayan		(P3) Program peningkatan perikanan nilai tambah produksi perikanan	Meningkatnya nilai ekspor perikanan (USD)	634.679	0	0	1.250.000	4.756.750.000	1.357.000	5.364.750.000	1.475.000	5.973.000.000	1.552.000	6.581.000.000	1.552.000	22.675.500.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Provinsi Aceh
				Meningkatnya jumlah masyarakat atau kelompok pengolah ikan (Kelompok)	25	0	0	25		27		30		35		142		Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	23 Kabupaten / Kota
				Nilai Tukar Nelayan (NTN)	97,79	98,50		99,75		101,25		103,00		106,00		106,00		Bidang perikanan tangkap	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan bahan makanan protein ikan				Nilai Tukar Pembudidayaan (NTPi)	-	98,00		98,50		99,50		101,00		103,00		103,00		Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
				Nilai konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	50,08	54		55		56		57,5		58,5		58,5		Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
				Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan, pusat jaringan usaha dan investasi (PUSJUI) serta peningkatan upaya pemasaran hasil perikanan dan kelautan	23	43	1.000.000.000	57	700.000.000	77	1.000.000.000	102	1.250.000.000	117	850.000.000	117	4.800.000.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	23 Kabupaten/Kota
				Jumlah pengadaan cool box bagi pelaku usaha distribusi hasil perikanan (unit; kumulatif)	300	600	366.000.000	727	1.58.750.000	926	248.750.000	1236	403.000.000	1486	325.000.000	1486	1.501.500.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	23 Kabupaten/Kota
				Jumlah gudang beku (cold storage) yang tersedia di daerah dan beroperasi sentra perikanan (unit; kumulatif)	0	0	0	1	2.000.000.000	2	2.000.000.000	0	0	3	2.000.000.000	3	6.000.000.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Aceh Besar, Pidie Jaya, Aceh Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Pabrik es kapasitas 1 - 3 Ton (unit; kumulatif)	0	2	1.400.000.000	3	700.000.000	4	700.000.000	7	2.250.000.000	9	1.500.000.000	9	6.550.000.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Jaya, Sabang, Aceh Besar, Aceh Timur dan Aceh Tamiang
				Jumlah pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang tersertifikasi (Unit; kumulatif)	8	13	350.000.000	16	210.000.000	21	350.000.000	28	490.000.000	34	420.000.000	34	1.820.000.000	Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	23 Kabupaten/Kota
			Kegiatan pengembangan Laboratorium pengujian mutu perikanan	Jumlah Lembar Hasil Uji (LHU) Customer (Dokumen; non kumulatif)	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	500.000.000	UPTD LPPMHP	Banda Aceh
				Jumlah Lembar Hasil Uji (LHU) Monitoring (Dokumen; non kumulatif)	2	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	1.200.000.000	UPTD LPPMHP	Banda Aceh
				Jumlah pembinaan kompetensi analis laboratorium perikanan (orang; non kumulatif)	5	15	120.000.000	16	128.000.000	17	136.000.000	25	200.000.000	22	176.000.000	20	760.000.000	UPTD LPPMHP	Banda Aceh

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Akreditasi laboratorium pengujian (penambahan parameter; kumulatif)	5	0	0	6	50.000.000	0	0	7	60.000.000	8	70.000.000	8	180.000.000	UPTD LPPMHP	Banda Aceh
				Jumlah surveillance KAN (Komite akreditasi nasional) (Dokumen; non kumulatif)	4	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	6	60.000.000	4	40.000.000	4	190.000.000	UPTD LPPMHP	Banda Aceh
				Jumlah Surveillance UPI (Unit Pengolahan Ikan) (Dokumen; non kumulatif)	3	4	80.000.000	4	80.000.000	5	100.000.000	8	160.000.000	5	100.000.000	5	520.000.000	UPTD LPPMHP	Banda Aceh
				Jumlah pelatihan sosialisasi mutu dan keamanan pangan produk hasil kelautan dan perikanan (kegiatan; non kumulatif)	8	9	200.000.000	9	200.000.000	9	200.000.000	9	300.000.000	9	300.000.000	9	1.200.000.000	UPTD LPPMHP	Banda Aceh
				Pengembangan sarana dan prasarana UPTD (LPPMHP) (lokasi; non kumulatif)	1	1	300.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	1.600.000.000	UPTD LPPMHP	Banda Aceh
(T3) Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	Birokrasi yang bersih dan akuntabel		(P4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (%)	100	100	6.128.826.700	100	6.789.428.150	100	6.244.528.150	100	6.244.528.150	100	6.244.528.150	100	31.651.839.300	Sekretariat	Banda Aceh

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat dinas (bulan)	12	12	45.500.000	12	40.500.000	12	40.500.000	12	40.500.000	12	40.500.000	12	207.500.000	Sekretariat	Banda Aceh
			Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	12	1.200.000.000	12	1.200.000.000	12	1.200.000.000	12	1.200.000.000	12	1.200.000.000	12	6.000.000.000	Sekretariat	Banda Aceh
			Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	12	12	242.850.000	12	242.850.000	12	242.850.000	12	242.850.000	12	242.850.000	12	1.214.250.000	Sekretariat	Banda Aceh
			Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (tahun)	1	1	30.000.000	1	40.500.000	1	40.500.000	1	40.500.000	1	40.500.000	1	192.000.000	Sekretariat	Banda Aceh
			Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor (bulan)	12	12	673.000.000	12	673.000.000	12	673.000.000	12	673.000.000	12	673.000.000	12	3.365.000.000	Sekretariat	Banda Aceh
			Kegiatan penyediaan alat tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (bulan)	12	12	437.486.700	12	437.486.700	12	437.486.700	12	437.486.700	12	437.486.700	12	2.187.433.500	Sekretariat	Banda Aceh
			Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12	12	178.000.000	12	178.000.000	12	178.000.000	12	178.000.000	12	178.000.000	12	890.000.000	Sekretariat	Banda Aceh

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (tahun)	1	1	40.000.000	1	50.201.450	1	50.201.450	1	50.201.450	1	50.201.450	1	240.805.800	Sekretariat	Banda Aceh
			Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	12	12	600.000.000	12	1.244.900.000	12	700.000.000	12	700.000.000	12	700.000.000	12	3.944.900.000	Sekretariat	Banda Aceh
			Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bulan)	12	12	46.800.000	12	46.800.000	12	46.800.000	12	46.800.000	12	46.800.000	12	234.000.000	Sekretariat	Banda Aceh
			Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman (bulan)	12	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	750.000.000	Sekretariat	Banda Aceh
			Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah penyediaan biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (bulan)	12	12	1.198.490.000	12	1.198.490.000	12	1.198.490.000	12	1.198.490.000	12	1.198.490.000	12	5.992.450.000	Sekretariat	Banda Aceh
			Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	12	12	1.286.700.000	12	1.286.700.000	12	1.286.700.000	12	1.286.700.000	12	1.286.700.000	12	6.433.500.000	Sekretariat	Banda Aceh
			(P5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	100	3.988.000.000	100	4.575.800.000	100	3.988.000.000	100	3.988.000.000	100	3.988.000.000	100	20.527.800.000	Sekretariat	Banda Aceh

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Kegiatan pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor (Lokasi; non kumulatif)	0	5	1.528.950.000	1	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.528.950.000	Sekretariat	Banda Aceh
			Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (SKPA; non kumulatif)	1	1	1.188.000.000	1	1.188.000.000	1	2.300.000.000	1	2.300.000.000	1	2.300.000.000	1	9.276.000.000	Sekretariat	Banda Aceh	
			Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (unit; non kumulatif)	90	95	1.271.050.000	95	1.387.800.000	100	1.688.000.000	100	1.688.000.000	100	1.688.000.000	100	7.722.850.000	Sekretariat	Banda Aceh	
			(P6) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai (%)	100	0	0	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	800.000.000	Sekretariat	Banda Aceh	
			Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya (unit; non kumulatif)	-	0	0	450	200.000.000	450	200.000.000	450	200.000.000	450	200.000.000	450	800.000.000	Sekretariat	Banda Aceh	
			(P7) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparaturnya yang memenuhi kompetensi (%)	100	0	0	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.000.000.000	Sekretariat	Banda Aceh	
			Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Jumlah Pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan teknis (orang)	-	0	0	50	500.000.000	55	500.000.000	55	500.000.000	60	500.000.000	60	2.000.000.000	Sekretariat	Banda Aceh	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(T4) Meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence Based Planning	Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan lintas sektor dan wilayah		(P8) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh (%)	80	80	3.000.000.000	80	3.200.000.000	80	3.500.000.000	90	3.700.000.000	90	4.000.000.000	90	17.400.000.000	Sekretariat	Banda Aceh
				Kegiatan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan statistik perikanan (dokumen; non kumulatif)	10	15	3.000.000.000	15	3.200.000.000	15	3.500.000.000	15	3.700.000.000	15	4.000.000.000	15	17.400.000.000	Sekretariat
(T5) Meningkatkan tatakelola lingkungan Hidup lestari	Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir		(P9) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Berkurangnya kasus IUU fishing (%)	N/A	N/A	5.870.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.870.000.000	Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan	Banda Aceh

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			(P9) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Luas Kawasan Konservasi Laut (Ha)	77.856	0	0	212.619	5.870.000.000	280.000	6.000.000.000	280.500,00	6.299.500.000	281.100,00	6.500.000.000	281.100,00	24.669.500.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Banda Aceh
				Persentase penyelesaian kasus IUU Fishing yang tepat Waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Kelautan dan Perikanan	
			Kegiatan pengawasan dan penertiban ilegal fishing	Jumlah kasus tindak pidana perikanan yang ditangani (kasus; non kumulatif)	6	4	280.000.000	2	140.000.000	2	140.000.000	2	140.000.000	1	60.000.000	1	760.000.000	Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan	WPP 571 dan WPP 572
				Jumlah patroli pengawasan perikanan (patroli; non kumulatif)	4	6	690.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	6	1.890.000.000	Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan	WPP 571 dan WPP 572
				Jumlah Kawasan Budidaya yang di awasi (kawasan ; kumulatif)	3	5	140.000.000	8	90.000.000	11	90.000.000	13	70.000.000	17	140.000.000	17	530.000.000	Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan	WPP 571 dan WPP 572

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah usaha pengolahan hasil perikanan yang di awasi (unit; kumulatif)	2	8	420.000.000	12	160.000.000	16	160.000.000	18	80.000.000	21	90.000.000	21	910.000.000	Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan	23 Kabupaten/ Kota
				Jumlah Kawasan Konservasi yang diawasi (Kawasan ; non kumulatif)	1	2	140.000.000	2	80.000.000	2	100.000.000	2	140.000.000	2	140.000.000	2	600.000.000	Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan	Aceh Besar, Sabang, Aceh Jaya, Simeulu, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil
				Jumlah pemantauan pos check point (PCP) (lokasi ; non kumulatif)	2	2	200.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	140.000.000	2	140.000.000	2	680.000.000	Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan	Subulussalam, Langkat-Tamiang
			Kegiatan Pembentukan kelompok masyarakat dan dievaluasi swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan	Jumlah POKMASWAS yang dibangun dan dievaluasi (kelompok; kumulatif)	20	70	2.500.000.000	90	800.000.000	110	800.000.000	120	400.000.000	126	300.000.000	96	4.800.000.000	Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan	23 Kabupaten/ Kota
				Jumlah POKMASWAS yang ditingkatkan Sarana dan Prasarana (Kelompok ; non kumulatif)	10	25	1.500.000.000	15	600.000.000	15	600.000.000	15	675.000.000	15	750.000.000	15	4.125.000.000	Bidang Pengawasan Kelautan dan Perikanan	23 Kabupaten/ Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola (kawasan; kumulatif)	4	0	0	5	1.000.000.000	6	1.000.000.000	7	1.000.000.000	8	1.000.000.000	9	4.000.000.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Simeulu, Sabang, A.tamiang
				Kawasan konservasi perairan yang dibina (kelompok; kumulatif)	4	0	0	5	100.000.000	6	100.000.000	7	100.000.000	9	200.000.000	9	500.000.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Simeulu, Sabang, A.tamiang
				Jumlah jenis ikan yang dilindungi (jumlah; kumulatif)	11	0	0	12	100.000.000	14	200.000.000	15	100.000.000	16	100.000.000	16	500.000.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	23 Kabupaten/Kota
				Jumlah bibit mangrove (bibit; non kumulatif)	50000	0	0	50000	150.000.000	50000	150.000.000	75000	225.000.000	75000	225.000.000	75000	750.000.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	23 Kabupaten/Kota
				Transplantasi Terumbu Karang (blok; non kumulatif)	100	0	0	100	165.000.000	100	165.000.000	180	297.000.000	250	412.500.000	250	1.039.500.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Sabang, Simeulu, Aceh Singkil
				Jumlah bibit vegetasi pantai (bibit; non kumulatif)	0	0	0	17000	85.000.000	19000	95.000.000	26500	132.500.000	28500	142.500.000	28500	455.000.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	23 Kabupaten/Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Tersedianya Rencana Tata Ruang (dokumen; Kumulatif)	1	0	0	2	2.000.000.000	3	2.000.000.000	4	2.500.000.000	5	2.500.000.000	5	9.000.000.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Banda Aceh
	Meningkatkan kesejahteraan petani dan Nelayan		(P10) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Berkurangnya jumlah KK miskin di pulau-pulau kecil (KK)	N/A	N/A	4.410.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.410.000.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Banda Aceh
			(P10) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan pulau-pulau kecil	Berkurangnya jumlah KK miskin di pesisir dan pulau-pulau kecil (KK)	N/A	0	0	150	5.070.500.000	200	5.719.000.000	250	6.368.000.000	300	7.017.500.000	300	24.175.000.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Banda Aceh
			Kegiatan pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah petani garam yang dibina (orang; kumulatif)	0	25	250.000.000	50	250.000.000	100	500.000.000	200	1.000.000.000	300	1.000.000.000	300	3.000.000.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Jangka Bireun, Lancang Pidie Jaya, Pidie, Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Utara, Abdya, Aceh Selatan
				Jumlah kolam evaporasi (unit; kumulatif)	0	25	190.000.000	50	200.000.000	100	400.000.000	201	808.000.000	276	600.000.000	276	2.198.000.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Jangka Bireun, Lancang Pidie Jaya, Pidie, Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Utara, Abdya, Aceh Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Rumah tunnel (unit; non kumulatif)	0	50	400.000.000	150	1.200.000.000	175	1.400.000.000	200	1.600.000.000	250	2.000.000.000	250	6.600.000.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Jangka Bireun, Lancang Pidie Jaya, Pidie, Aceh Besar, Aceh Timur, Aceh Utara, Abdya, Aceh Selatan
	Bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir			Jumlah Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarannya (pulau)	N/A	0	0	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	8.000.000.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	
				Jumlah kawasan pesisir yang terfasilitasi pengelolaannya secara terpadu	N/A	0	0	3	1.420.500.000	3	1.419.000.000	2	960.000.000	3	1.417.500.000	3	5.217.000.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	
				Jumlah kawasan konservasi yang dikelola (kawasan; kumulatif)	4	4	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Simeulu, Sabang, A.tamiang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Kawasan konservasi perairan yang dibina (kelompok; kumulatif)	4	5	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Simeulu, Sabang, A.tamiang
				Jumlah jenis ikan yang dilindungi (jumlah)	11	12	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	23 Kabupaten/Kota
				Jumlah bibit mangrove (bibit; non kumulatif)	50000	60000	180.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	23 Kabupaten/Kota
				Transplatasi Terumbu Karang (blok; non kumulatif)	100	200	240.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Sabang, Simeulu, Aceh Singkil
				Jumlah bibit vegetasi pantai (bibit; non kumulatif)	0	30000	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	23 Kabupaten/Kota
				Tersedianya Rencana Tata Ruang (dokumen; Kumulatif)	1	2	1.800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000.000	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Banda Aceh

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Pembangunan perikanan merupakan salah satu bagian dari capaian pembangunan daerah yang tergambar dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA). Keberhasilan dari pembangunan perikanan tersebut juga memperlihatkan seberapa besar capaian indikator kinerja daerah dan indikator kinerja utama yang akan dicapai dalam periode pembangunan lima tahun yang akan datang. Pencapaian indikator yang ditargetkan tersebut tentunya tidak terlepas dari keberhasilan sebuah program dan kegiatan yang sesuai dan tepat sasaran dengan prinsip perencanaan *money follow priority programs*.

Program-program mencakup beberapa kegiatan yang berupa kerangka regulasi yang bertujuan untuk mengatur, mendorong, serta melaksanakan kegiatan pembangunan. Kegiatan merupakan penjabaran menyeluruh dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi pembangunan Aceh. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMA 2017-2022 disajikan pada Tabel 7.1

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMA

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMA Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMA
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Produksi perikanan (Ton)	276.144,42	294.965,66	313.786,90	332.608,14	351.429,38	370.250,62	370.250,62
	- Perikanan Tangkap (Ton)	188.523,15	197.132,13	205.741,12	214.350,10	222.959,09	231.568,07	231.568,07
	- Perikanan Budidaya (Ton)	87.621,28	97.833,54	108.045,79	118.258,05	128.470,30	138.682,56	138.682,56
2	Produksi Garam (Ton)	0,00	15.113,80	19.647,94	25.542,32	33.205,02	43.166,52	43.166,52
3	Konsumsi ikan (Kg/Kapita/Tahun)	49,86	51,92	53,60	55,28	56,96	58,64	58,64
4	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	66,32	69,67	73,34	77,01	80,67	84,34	84,34
5	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	1,38	2,57	3,76	4,95	4,96	4,97	4,97

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMA	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMA
		Tahun 0	2018	2019	2020	2021	2022	
6	Luasan kawasan konservasi (ha)	77.856,66	145.237,77	212.618,89	280.000,00	280.500,00	281.100,00	281.100,00
7	Nilai Tukar Nelayan (%)	97,86	98.5	99.75	101.25	103	106	106
8	Nilai Ekspor Perikanan (USD)	634.679	1.142.899.8	1.250.000	1.357.000	1.475.000	1.552.000	1.552.000
9	Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)	-	98,00	98,50	99,50	101	103	103
10	Kelompok pengolah ikan (Kelompok)	25	20	25	27	30	35	35
11	Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan (%)	4,83	4,85	4,87	4,94	4,96	4,98	4,98
12	Nilai SAKIP (%)	60,28	63,00	65,50	70,00	77,00	85,00	85,00
13	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan (%)	80,00	100	100	100	100	100	100

Pada Tabel 7.1 tertera beberapa indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang disesuaikan dengan sasaran yang terdapat didalam RPJMA yaitu meningkatnya produksi dan produktivitas subsektor perikanan dan bertambahnya luasan kawasan konservasi laut dan pesisir. Salah satu indikator kinerja yang terkait dengan kesejahteraan nelayan terukur dari Nilai Tukar Nelayan (NTN), nilai ini menggambarkan seberapa besar indeks yang diterima dari hasil berproduksi terhadap pengeluaran sehari-hari. Semakin besar pendapatan dan diiringi pengeluaran yang rendah maka menggambarkan kesejahteraan nelayan meningkat dan sebaliknya. Dalam pencapaian sasaran tersebut sangat tergantung pada peningkatan produksi perikanan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dari sub sektor perikanan. Rata-rata target peningkatan produksi perikanan dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang sebesar 6,04 %. Target produksi tersebut disumbangkan dari subsektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2017-2022 diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan Aceh 5 (lima) tahun mendatang. Rencana Strategis menjadi dasar pencapaian kinerja yang semakin baik untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan khususnya. Dengan melaksanakan Renstra sangat diperlukan adanya komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Rencana strategis ini dibuat dengan segala daya upaya agar dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan, serta dalam mendukung kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dibawah koordinasi Pemerintah Aceh.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan Aceh tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen RENSTRA, melainkan diperlukan dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat luas. Akhirnya, kebersamaan dan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dengan semua pihak yang terkait diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk mensejahterakan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, dan masyarakat pesisir lainnya melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dapat terwujud.